

# KONDISI DEMOKRASI DI MASA COVID-19

Temuan Survei Nasional:  
Updated 12 – 15 Agustus 2020

# Latar Belakang

- Menurut laporan evaluatif V-Dem (Varieties of democracy Institute), COVID-19 berdampak negatif terhadap banyak negara demokrasi. ([https://www.v-dem.net/media/filer\\_public/52/eb/52eb913a-b1ad-4e55-9b4b-3710ff70d1bf/pb\\_23.pdf](https://www.v-dem.net/media/filer_public/52/eb/52eb913a-b1ad-4e55-9b4b-3710ff70d1bf/pb_23.pdf))
- Karena COVID-19 banyak negara memberlakukan keadaan darurat tanpa dukungan secara sukarela dari berbagai komponen masyarakat.
- Pelanggaran HAM terjadi, bahkan ada penguasa memanfaatkan keadaan darurat tersebut meskipun pandemi COVID-19 mulai menurun.

- ▶ Sebelum COVID-19, 1 / 3 demokrasi di dunia mengalami kemunduran berdemokrasi, dan dengan merebaknya COVID-19 kemunduran tersebut bertambah laju dan meluas.
- ▶ V-Dem membuat tipologi kondisi rezim pada masa COVID-19 ini: Negara otokrasi (otoritarianisme) penuh, negara demokrasi dengan resiko demokrasinya menurut sangat kuat, negara demokrasi dengan resiko demokrasinya menurun secara sedang, dan negara demokrasi dengan resiko demokrasinya menurun sedikit.

- ▶ Beberapa demokrasi lama di Asia dengan resiko kemunduran secara kuat adalah India dan Filipina.
- ▶ Sementara Indonesia dinilai beresiko sedang, Yang jadi perhatian terutama ketika diberlakukan darurat bencana nasional.
- ▶ Satu cara untuk menilai keadaan demokrasi di sebuah negara adalah dengan meminta penilaian pada warga sendiri di masing-masing negara: Bagaimana warga merasakan pelaksanaan demokrasi, dan bagaimana komitmen atau dukungan mereka pada demokrasi.

- ▶ Membandingkan penilaian warga sebelum dan sesudah ada COVID-19 adalah cara sederhana untuk melihat efek COVID-19 terhadap demokrasi.
- ▶ Untuk itu SMRC melakukan survei nasional terkait dengan masalah tersebut.
- ▶ Survei terakhir dilakukan 12–15 Agustus 2020.

# Metodologi

- SMRC telah melakukan sejumlah survei nasional dengan memilih sampel secara random dari populasi pemilih (warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah). Seluruh responden dalam survei tersebut diwawancarai dengan tatap muka.
- Untuk mengetahui perkembangan isu-isu mutakhir, maka dilakukan survei telepon terhadap responden survei tersebut. Sampel survei dengan telpon ini hanya untuk responden yang memiliki telepon/cellphone, sebesar 71% dari populasi nasional.
- Survei lewat telpon dengan mempertimbangkan aspek metodologis secara seksama adalah cara yang paling mungkin dilakukan di tengah-tengah upaya warga melakukan social distancing.

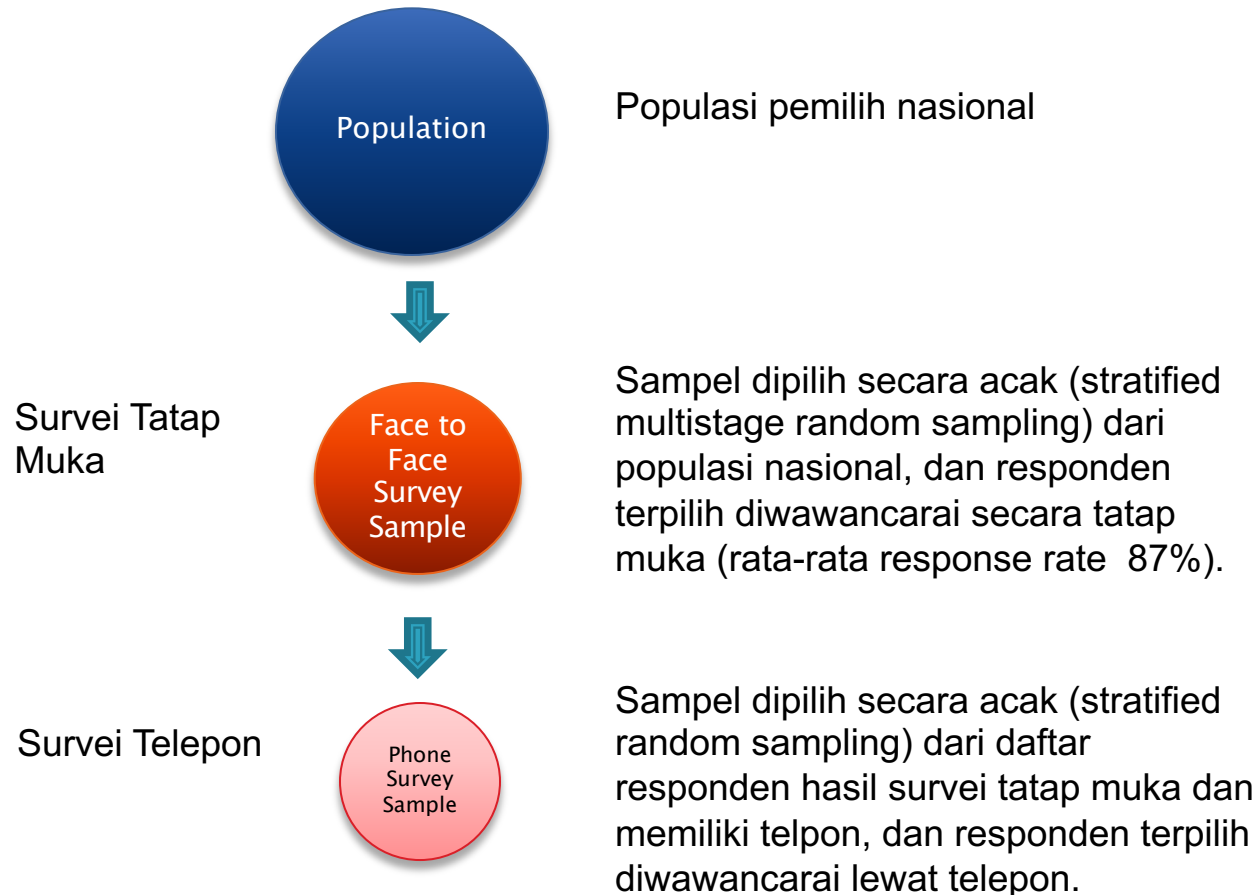
# Metodologi

- Untuk mendapatkan sampel yang proporsional dari responden yang memiliki telepon tersebut terhadap karakteristik populasi nasional dilakukan pembobotan terhadap sampel terpilih.
- Sampel sebanyak 2202 responden dipilih secara acak dari koleksi sampel acak survei tatap muka yang telah dilakukan SMRC sebelumnya dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional. Margin of error survei diperkirakan  $\pm 2.1\%$  pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.
- Wawancara terakhir dilakukan pada 12 – 15 Agustus 2020.

# Margin of Error

- Margin of error (moe) dalam laporan ini merupakan perkiraan simpangan statistik proporsi dari nilai yang sebenarnya untuk kondisi statistik proporsi ( $\hat{p}$ ) dengan *standard error* maksimum (yakni ketika  $\hat{p} = 50\%$ ) pada tingkat kepercayaan 95% dan asumsi simple random sampling.
- Moe tersebut berguna untuk interpretasi hasil sebagai berikut:
  - Moe secara nasional diperkirakan +/- 2.1%. Artinya bila estimasi suatu proporsi secara nasional bernilai 50% maka nilai yang sebenarnya diperkirakan  $50\% \pm 2.1\%$  (47.9% - 52.1%) pada tingkat kepercayaan 95%.
- Moe pada dasarnya tidak bersifat unik, karena ia merupakan fungsi dari proporsi  $\hat{p}$  dan ukuran sampel  $n$ . Moe terbesar adalah ketika  $\hat{p} = 50\%$ . Semakin jauh  $\hat{p}$  dari 50% ( $\hat{p}$  mendekati 0 atau mendekati 100%), semakin kecil moe-nya. Maka moe untuk masing-masing proporsi harus dihitung sendiri-sendiri.
- Namun demikian, karena moe yang dinyatakan dalam laporan ini merupakan moe terbesar, maka moe tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk interpretasi hasil. Misalkan secara nasional diperkirakan 52% warga setuju terhadap suatu isu sedangkan 48% tidak setuju, maka dapat diperkirakan bahwa proporsi yang setuju dan tidak setuju tersebut tidak berbeda signifikan karena selisihnya ( $52\% - 48\% = 4\%$ ) kurang dari  $2 \times moe$ , yakni kurang dari 4.2% ( $= 2 \times 2.1\%$ ). Sedangkan bila yang setuju 60% dan tidak setuju 40% (selisih 20%), maka perbedaan tersebut signifikan.

# Populasi, Survei Tatap Muka & Survei Telepon



# Response Rate

Total Sampel Survei Tatap Muka Jun 2016 – Maret 2020 [A]	Total Sampel Tatap Muka yang punya telepon [B]	Total Sampel pemilik telepon yang dipilih secara acak untuk dikontak [C]	Jumlah Responden yang berhasil diwawancarai lewat telepon [D]
110,632	78,610	16,488	2,202

# Validasi Sampel dan Pembobotan Data

- Sampel hasil survei divalidasi dengan membandingkan komposisi demografi sampel dan populasi hasil sensus BPS. Demografi tersebut meliputi, provinsi, gender, desa-kota, umur, etnis, dan agama.
- Bila ada perbedaan signifikan antara demografi sampel dan populasi, maka dilakukan pembobotan data sedemikian rupa sehingga komposisi demografi sampel menjadi proporsional terhadap populasi.

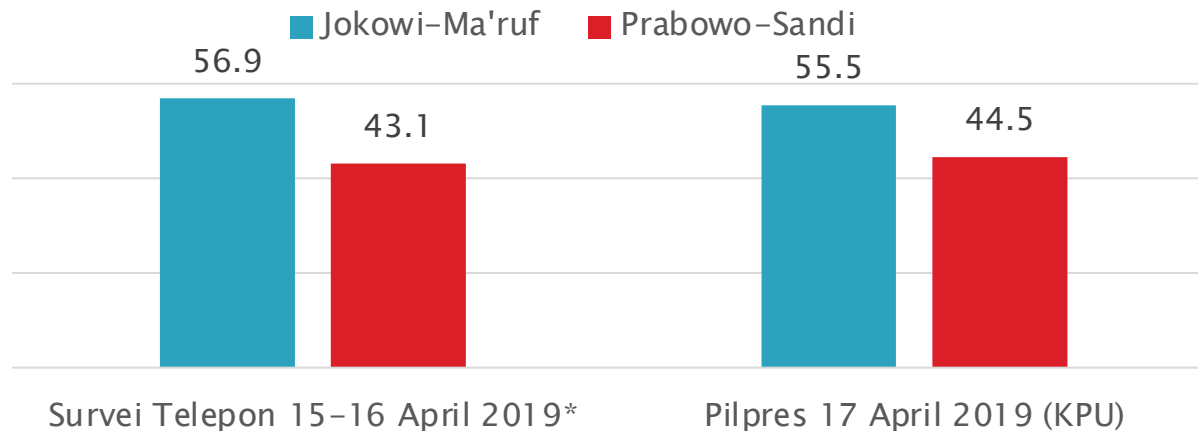
# Prosedur Sampling Survei Telepon

- Stratifikasi: pertama-tama koleksi sampel acak hasil survei tatap muka dikelompokkan menurut provinsi dan gender.
- Selanjutnya, di masing-masing stratum (provinsi-gender) dipilih sampel secara acak dengan jumlah proporsional sesuai populasi. Sebagai contoh, bila proporsi pemilih Jawa Barat adalah 17.4% dan di NTB adalah 1.9% dari total populasi; maka, dengan total sampel nasional 2,202 responden, sampel di Jawa Barat sekitar 383 responden dan sampel di NTB sekitar 42 responden. Begitu juga dalam hal proporsionalitas gender.

# Pengalaman Survei Telepon Menjelang Pilpres 2019

- Pengalaman survei telepon menjelang Pilpres 2019 menunjukkan bahwa metode ini bisa diandalkan untuk memperkirakan perilaku politik pemilih.
- Survei Telepon dua hari menjelang Pilpres 2019 sangat dekat dengan hasil Pilpres, selisihnya di dalam margin of error.

Seandainya pemilihan presiden dilaksanakan sekarang ini, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih? ... %



\* Ket: Hasil survei telepon dengan undecided diprediksi.

# PROFIL RESPONDEN

# Profil Demografi Sampel Dibanding Populasi

KATEGORI	POPULASI	SAMPEL ASLI	SAMPEL DIBOBOT
<b>GENDER</b>			
Laki-laki	50.0	50.0	50.1
Perempuan	50.0	50.0	49.9
<b>DESA-KOTA</b>			
Pedesaan	50.2	48.0	50.1
Perkotaan	49.8	52.0	49.9
<b>UMUR</b>			
<= 21 thn	12.7	3.6	12.5
22-25 thn	10.1	3.6	10.0
26-40 thn	37.0	31.6	37.0
41-55 thn	25.0	40.6	25.2
> 55 thn	15.2	20.5	15.3

KATEGORI	POPULASI	SAMPEL ASLI	SAMPEL DIBOBOT
<b>AGAMA</b>			
Islam	87.3	89.8	88.0
Protestan/Katolik	9.8	7.8	9.4
Lainnya	3.0	2.4	2.6
<b>ETNIS</b>			
Jawa	40.2	43.8	40.5
Sunda	15.5	15.1	15.5
Batak	3.6	2.6	3.7
Madura	3.0	3.1	3.1
Betawi	2.9	3.3	2.8
Bugis	2.7	3.0	2.6
Minang	2.7	2.9	2.7
Lainnya	29.4	26.2	29.1

## ...Lanjutan: Perbandingan Profil Demografi

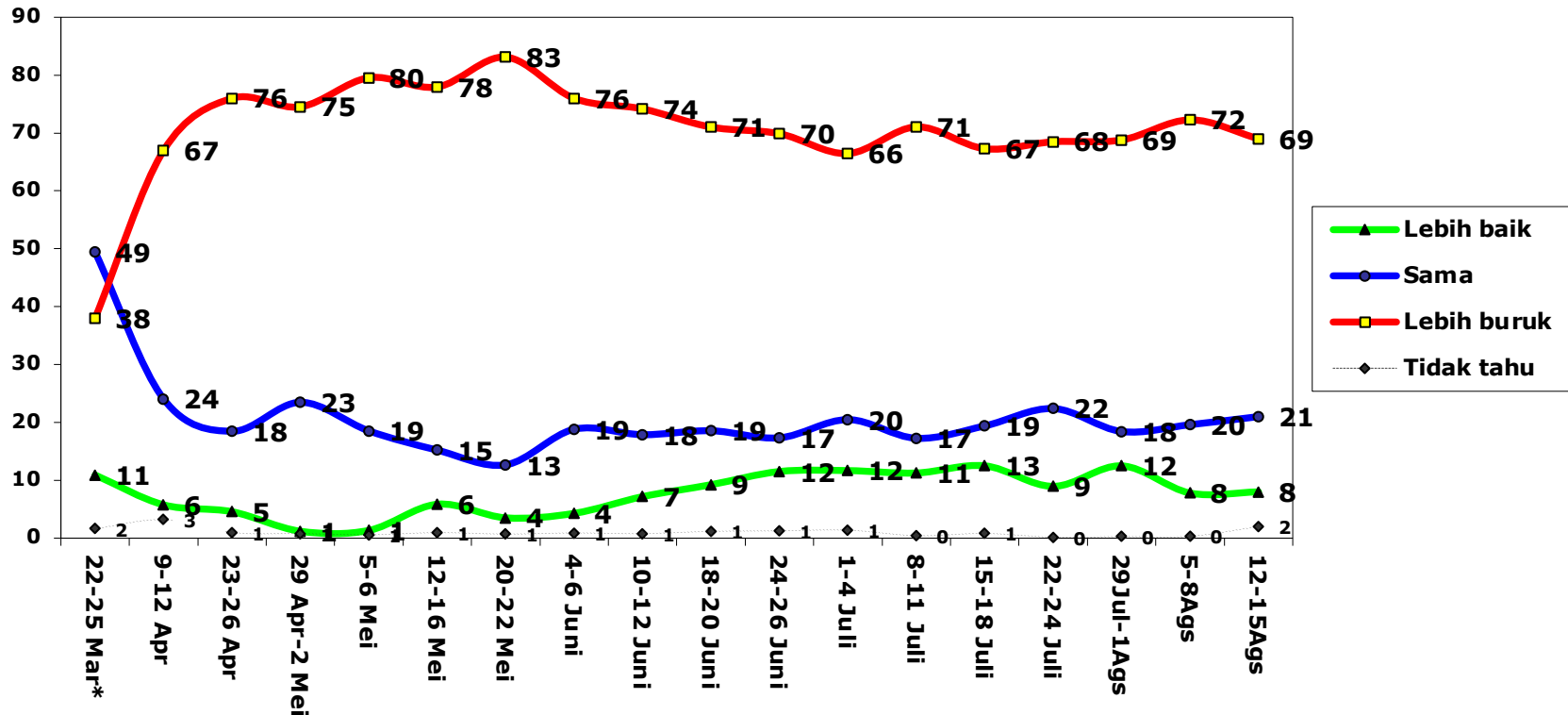
KATEGORI	POPULASI	SAMPEL ASLI	SAMPEL DIBOBOT
<b>PROVINSI</b>			
Aceh	1.8	1.9	1.9
Sumatera Utara	5.1	5.1	5.1
Sumatera Barat	1.9	2.0	2.0
Riau	2.0	2.0	2.0
Jambi	1.3	1.3	1.3
Sumatera Selatan	3.1	3.1	3.1
Bengkulu	0.7	0.7	0.7
Lampung	3.2	3.2	3.2
Bangka Belitung	0.5	0.5	0.5
Kepulauan Riau	0.6	0.6	0.6
DKI Jakarta	4.1	4.0	4.0
Jawa Barat	17.4	17.4	17.4
Jawa Tengah	14.6	14.6	14.6
DI Yogyakarta	1.4	1.5	1.4
Jawa Timur	16.2	16.2	16.2
Banten	4.3	4.3	4.3
Bali	1.6	1.6	1.6

KATEGORI	POPULASI	SAMPEL ASLI	SAMPEL DIBOBOT
<b>PROVINSI</b>			
NTB	1.9	1.9	1.9
NTT	1.8	1.8	1.8
Kalimantan Barat	1.9	1.9	1.9
Kalimantan Tengah	0.9	1.0	0.9
Kalimantan Selatan	1.5	1.5	1.5
Kalimantan Timur	1.3	1.3	1.3
Kalimantan Utara	0.2	0.2	0.2
Sulawesi Utara	1.0	1.0	1.0
Sulawesi Tengah	1.0	1.0	1.0
Sulawesi Selatan	3.2	3.2	3.2
Sulawesi Tenggara	0.9	0.9	0.9
Gorontalo	0.4	0.4	0.4
Sulawesi Barat	0.5	0.5	0.5
Maluku	0.7	0.7	0.7
Maluku Utara	0.4	0.4	0.4
Papua Barat	0.4	0.4	0.4
Papua	1.9	1.9	1.9

# PENILAIAN ATAS KONDISI EKONOMI DAN POLHUKAM SECARA UMUM

- ▶ Kondisi ekonomi nasional
- ▶ Kondisi politik secara umum
- ▶ Kondisi keamanan dan penegakan hukum secara umum
- ▶ Kemampuan Polri secara umum menjaga keamanan dan menegakkan hukum

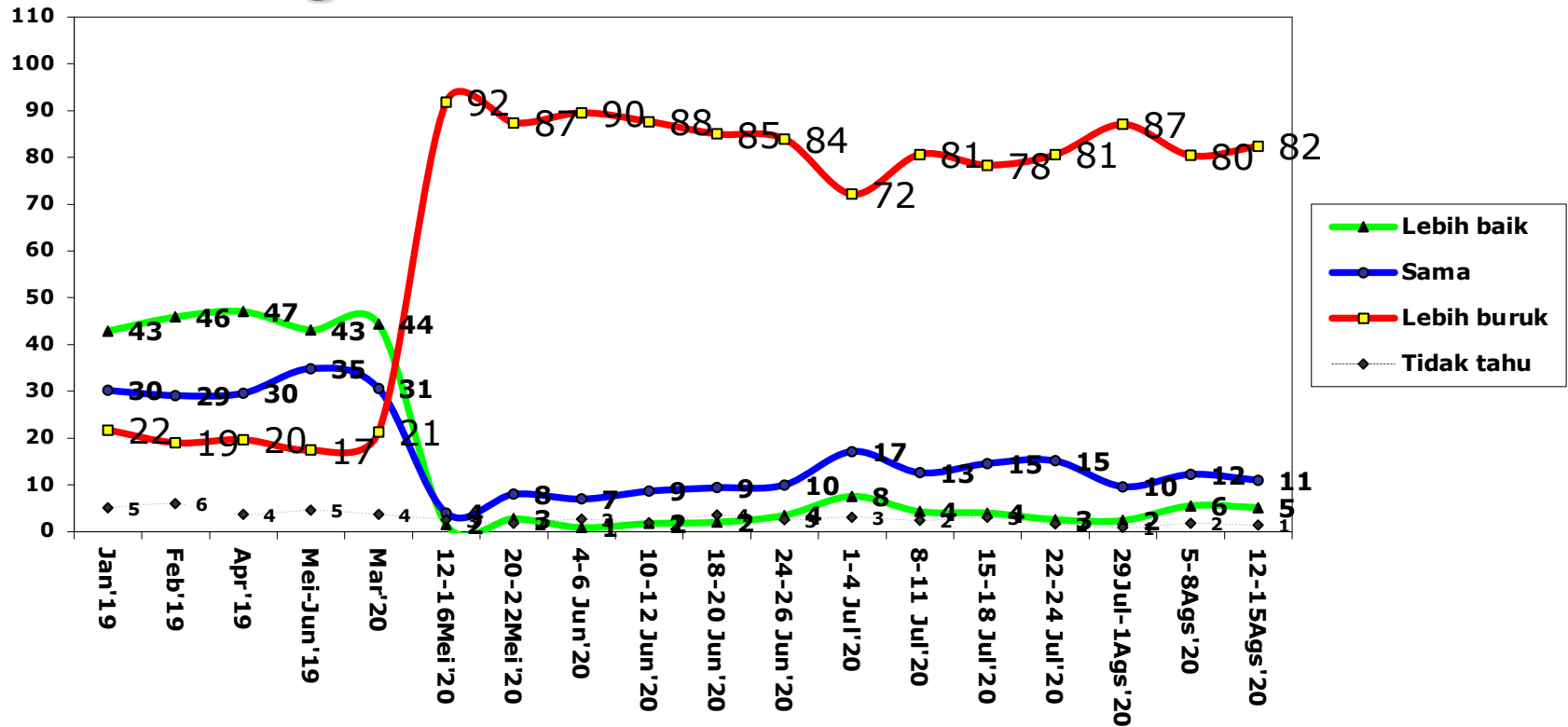
# Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Sekarang Dibanding Sebelum Wabah Covid-19 (%): Tren Maret-Agustus 2020



Ket: \*) Bentuk pertanyaan survei tanggal 22-25 Maret 2020: "Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi RUMAH TANGGA Ibu/Bapak pada umumnya SEKARANG INI dibanding sebelum adanya himbuan pemerintah bekerja/belajar di rumah (untuk mencegah penyebaran virus Corona)?"

Yang mengatakan kondisi ekonomi rumah tangga sekarang lebih buruk dibanding sebelum wabah sekitar 69%, jauh lebih buruk dibanding penilaian pada Maret 2020, 38%. Penilaian paling negatif terjadi dalam survei 20-22 Mei, 83%, kemudian perlahan mulai menurun.

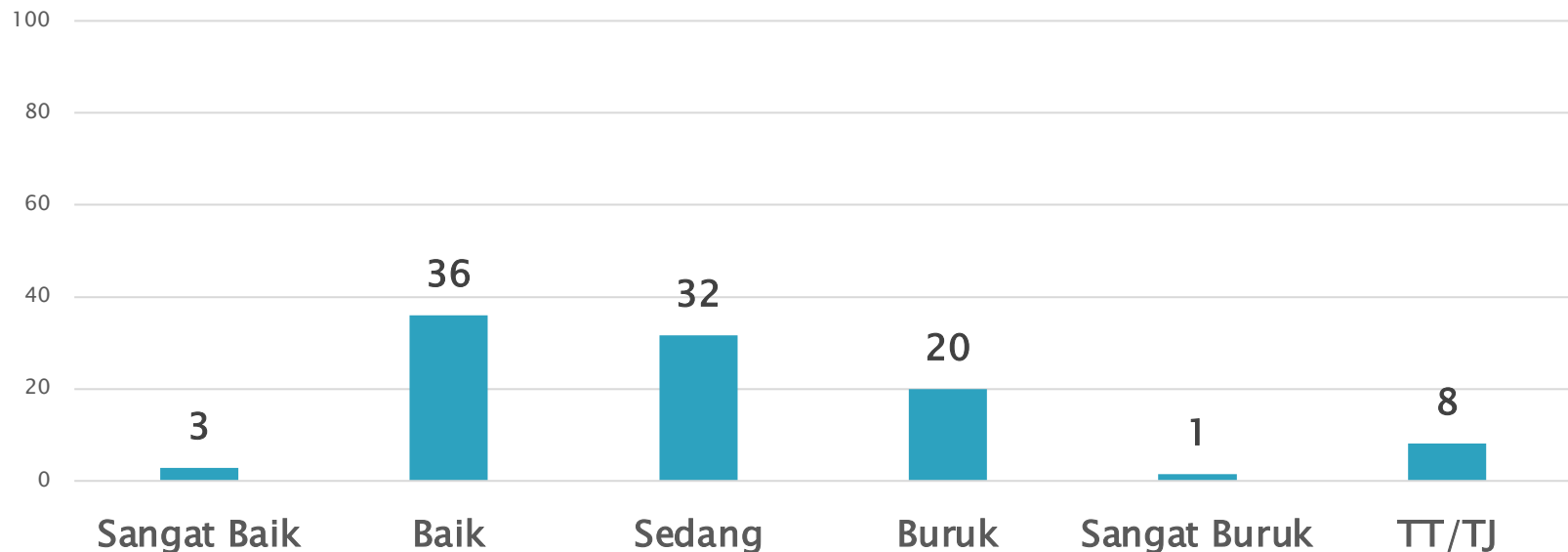
# Kondisi Ekonomi Nasional Sekarang Dibanding Tahun Lalu (%): Tren 2019–2020



Sentimen negatif pada kondisi ekonomi nasional pada masa Covid-19 adalah tertinggi sejak awal reformasi. Sentimen negatif paling tinggi mencapai 92% pada 12-16 Mei 2020, setelah itu perlahan menurun sampai 72% di survei akhir Juni, kemudian Kembali meningkat sampai 82% di terakhir 12-15 Agustus 2020.

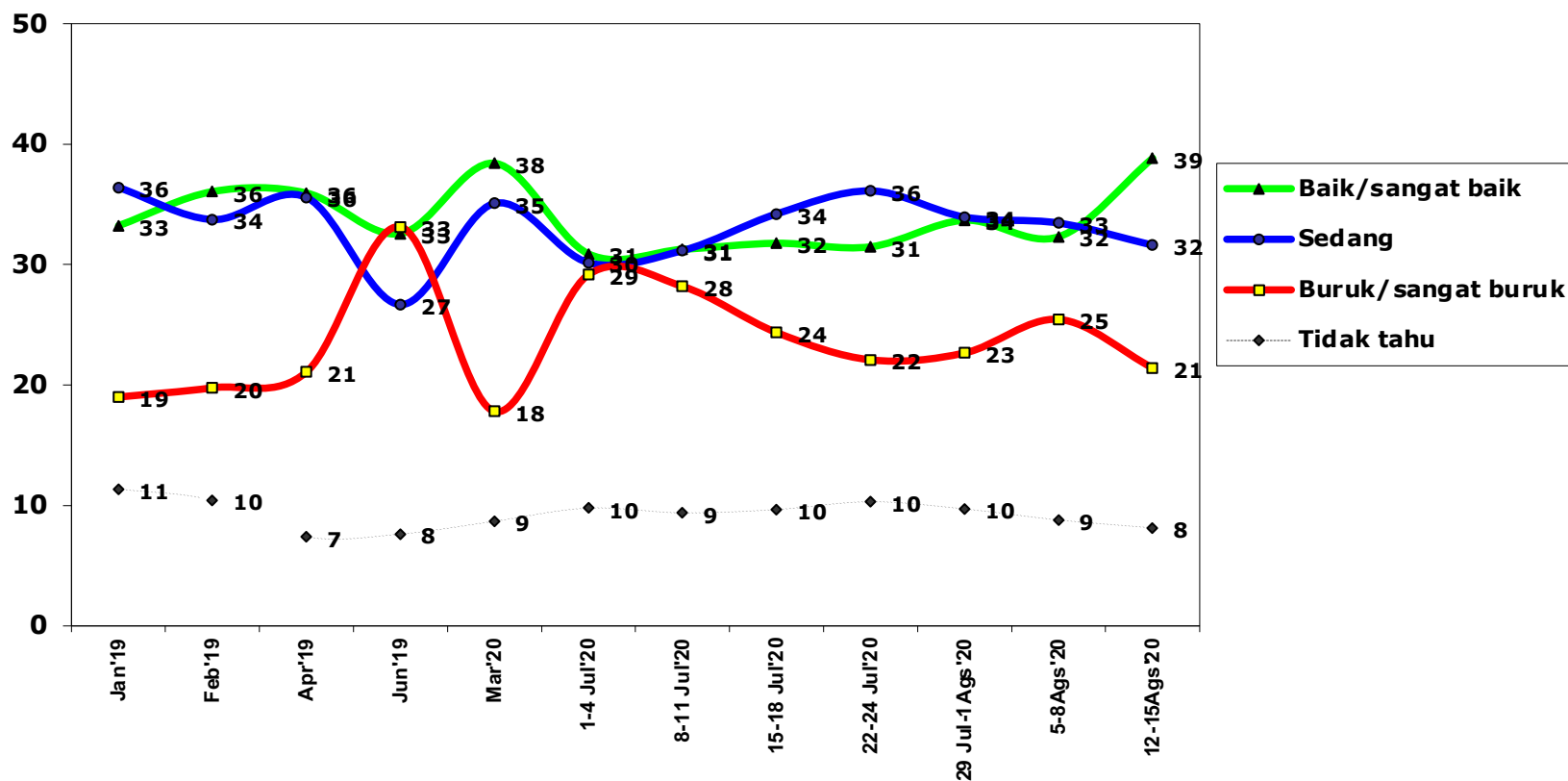
# Kondisi Politik

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan politik nasional pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk atau sangat buruk? ... (%)



Warga yang menilai kondisi politik nasional baik/sangat baik sekitar 39%, yang menilai buruk/sangat buruk 21%, dan ada 32% yang menilai sedang saja.

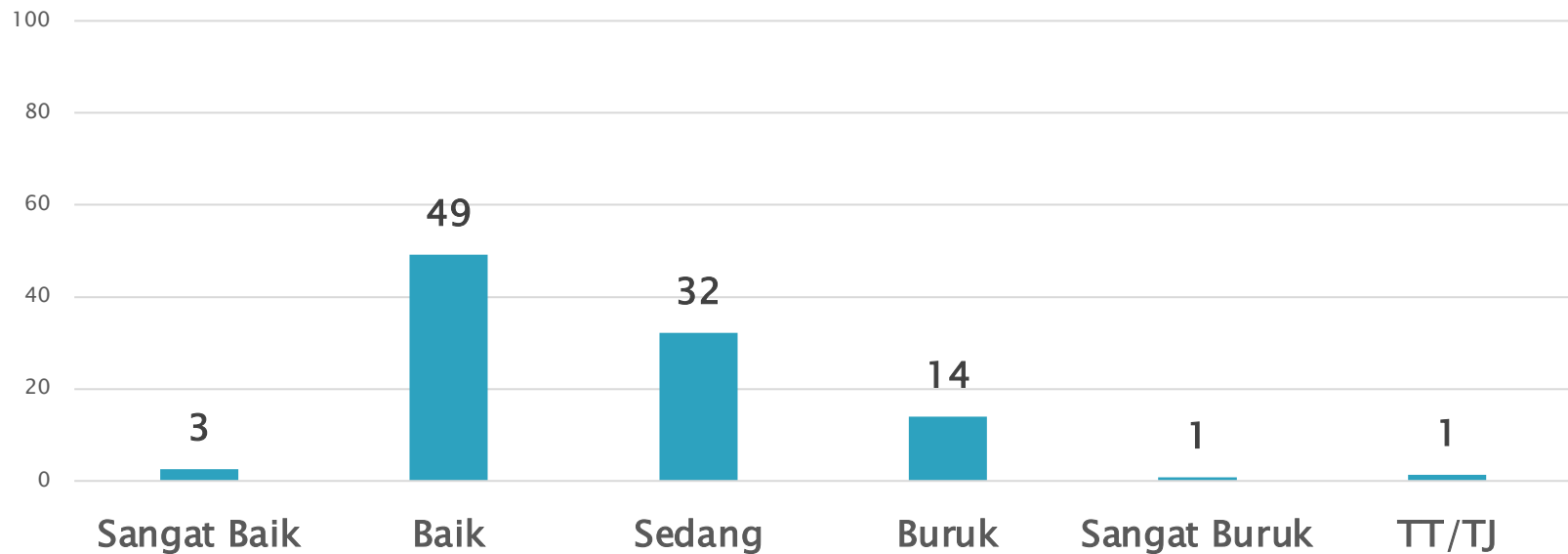
# Kondisi Politik secara Nasional Sekarang (%)



Juni 2019 kerusuhan penetapan hasil Pilpres, Juli 2020 COVID-19 sudah merebak luas

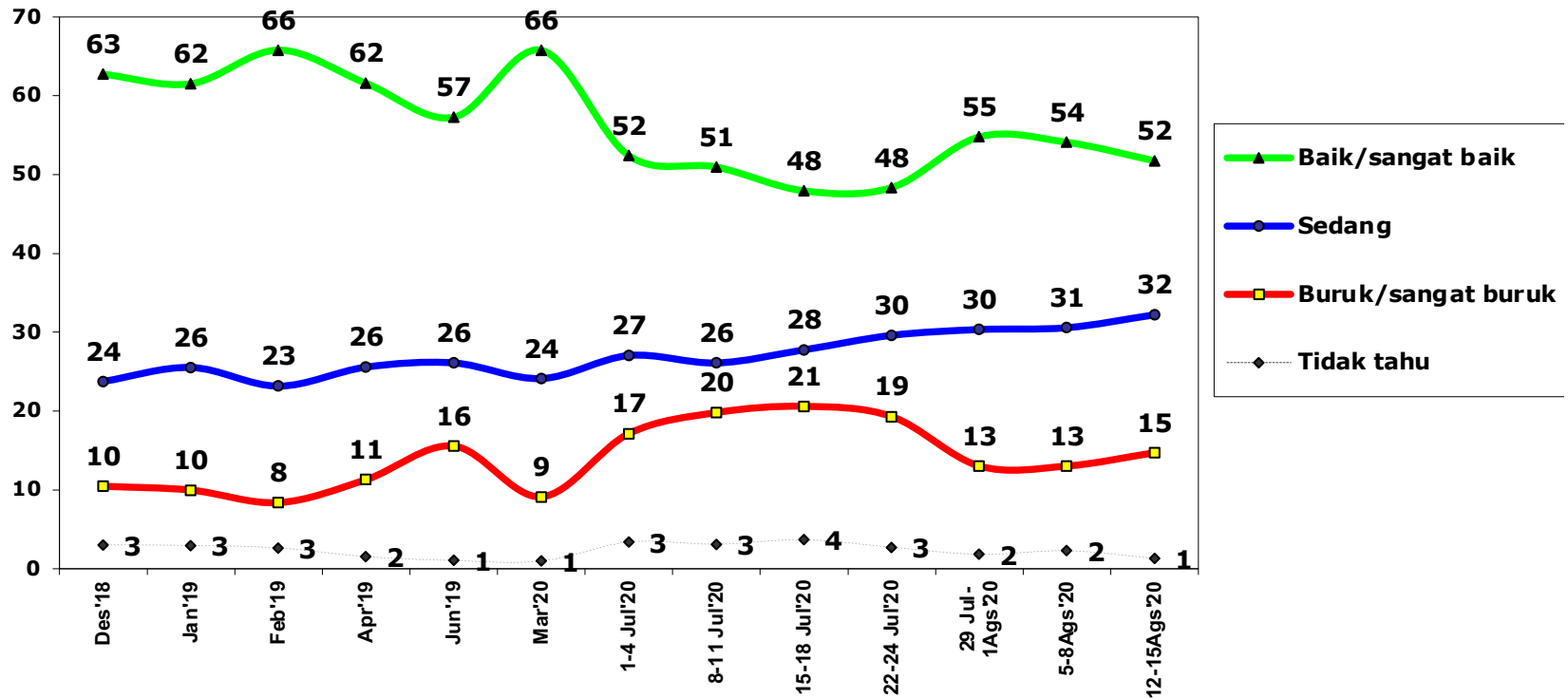
# Kondisi Keamanan

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan keamanan di negara kita pada umumnya sekarang? Sangat baik, baik, sedang, buruk atau sangat buruk? ... (%)



Warga yang menilai kondisi keamanan baik/sangat baik sekitar 52%, yang menilai buruk/sangat buruk 15%, dan ada 32% yang menilai sedang saja.

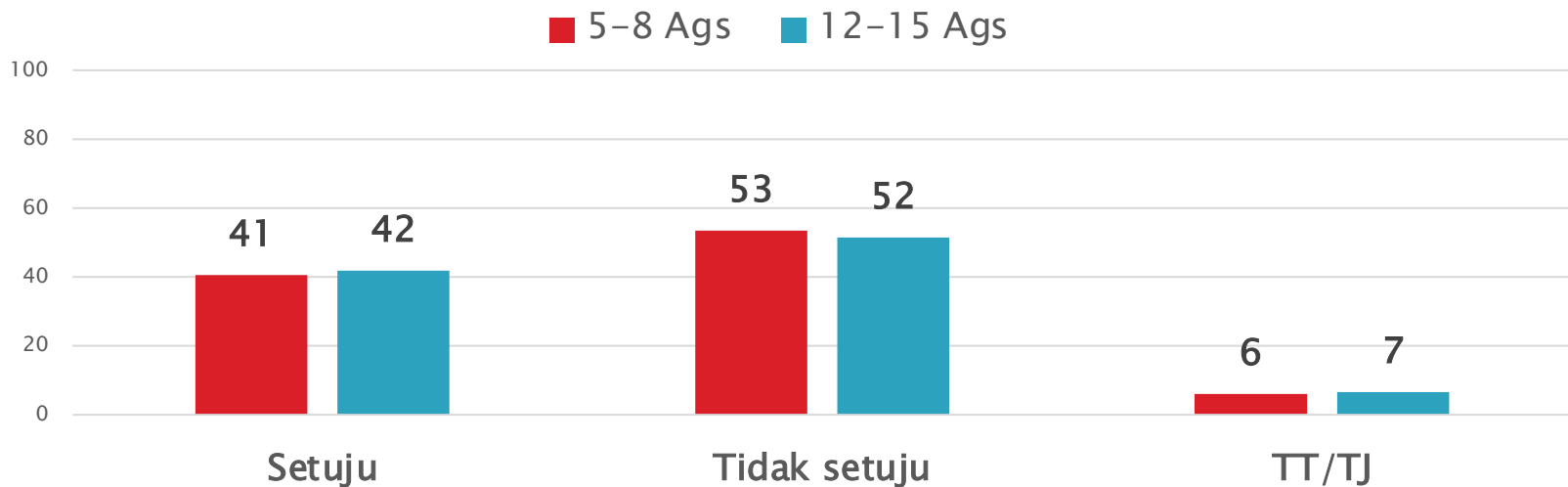
# Keadaan Keamanan dan Ketertiban Secara Nasional Sekarang (%)



Juni 2019 kerusuhan massa pasca-penetapan hasil Pipres, Juli 2020 COVID sudah merebak luas

# Pemerintah Belum Bisa Melindungi Rakyat dari Ancaman Keamanan?

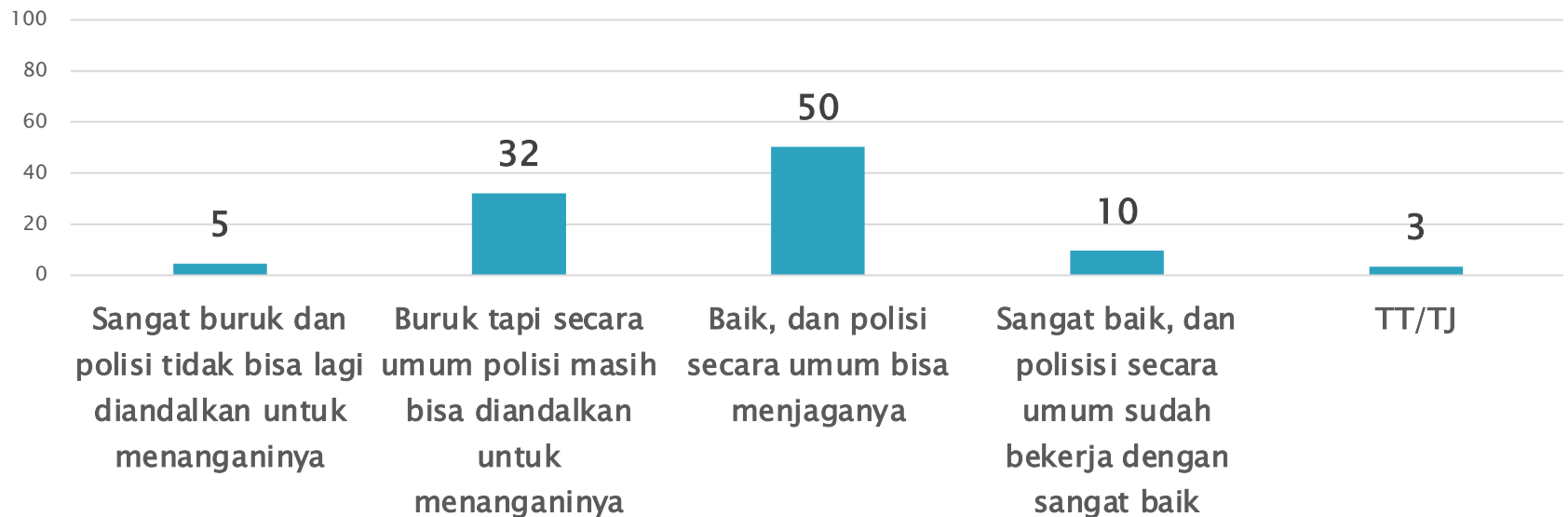
Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat bahwa pemerintah belum bisa melindungi rakyat dari ancaman keamanan? ... (%)



Saat ini, ada 42% yang setuju bahwa pemerintah belum bisa melindungi rakyat dari ancaman keamanan. Yang tidak setuju 52%.

# Keamanan dan Pelaksanaan Hukum

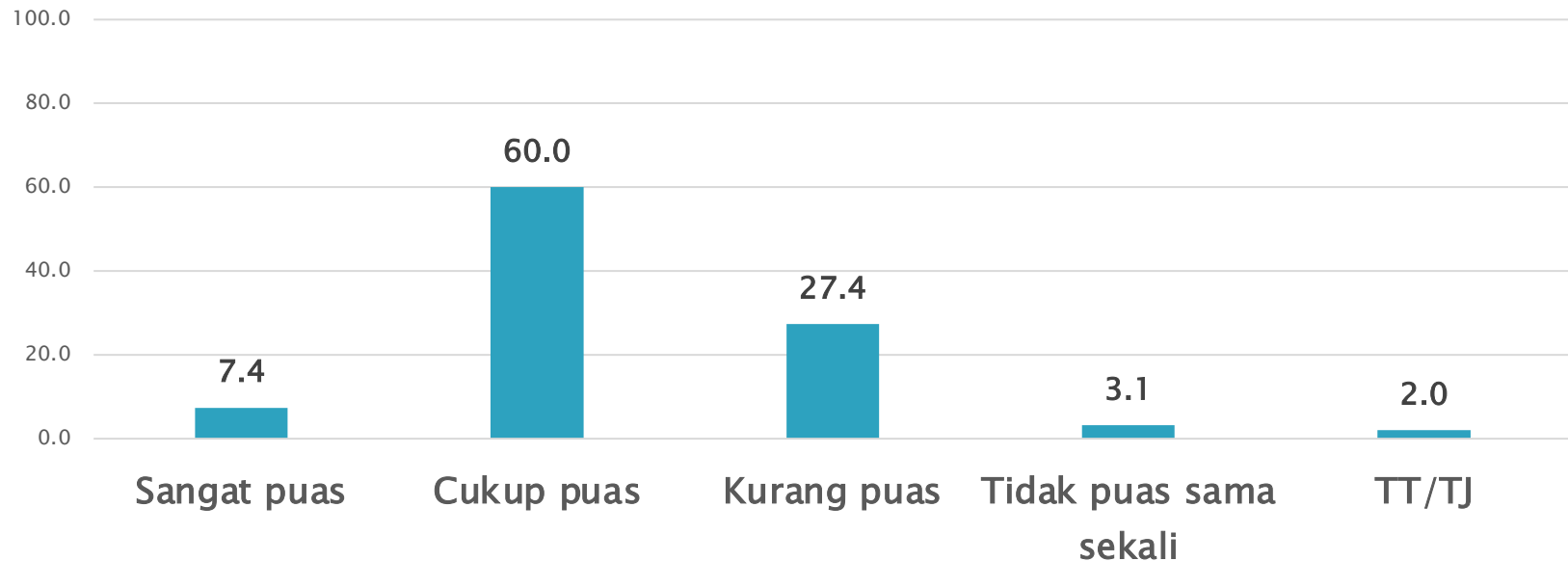
Menurut Ibu/Bapak secara nasional seberapa buruk atau seberapa baik keamanan dan atau pelaksanaan hukum kita sekarang? ... (%)



Warga yang menilai keamanan dan atau pelaksanaan hukum baik/sangat baik sekitar 60%.

# Kepuasan terhadap Kerja Presiden

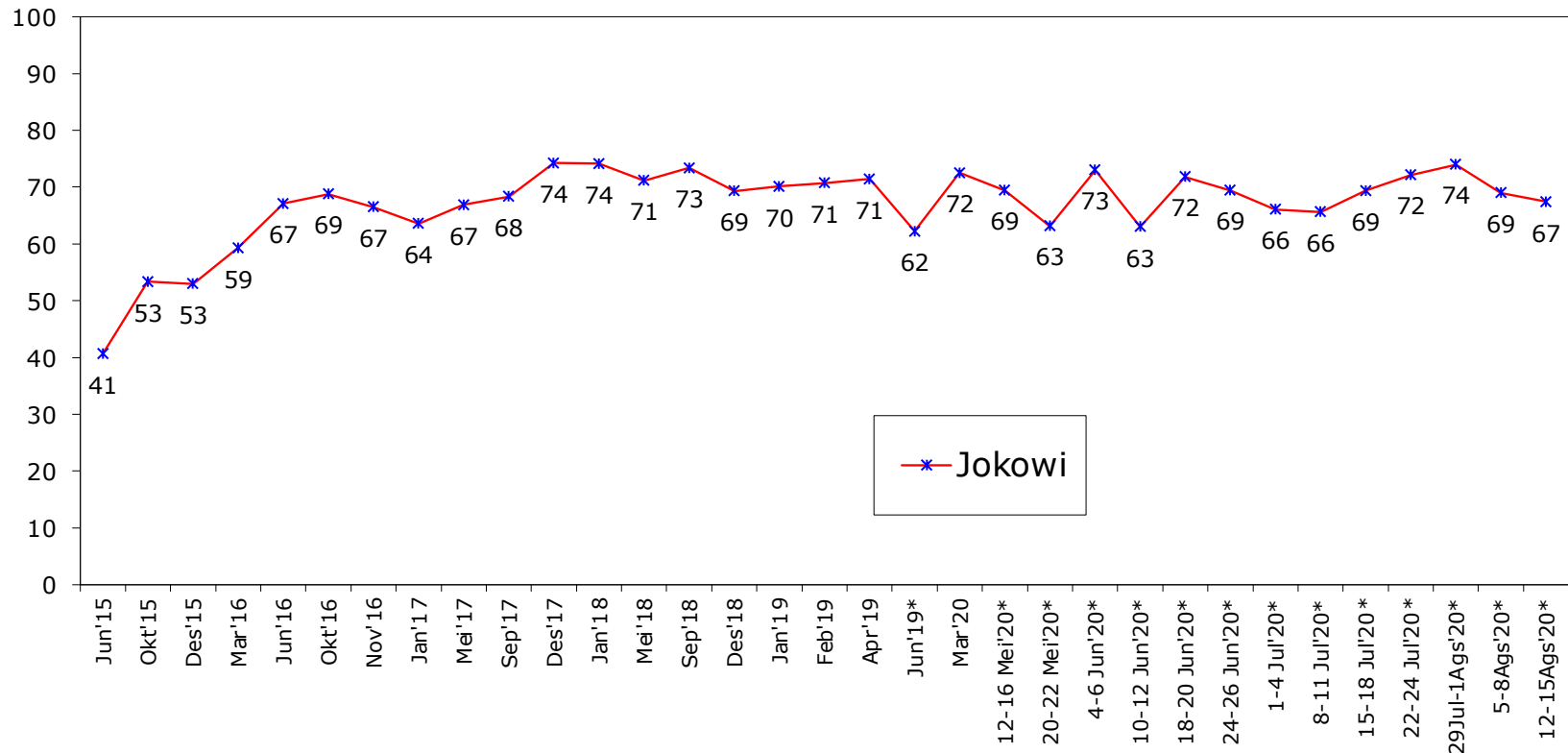
Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)? ... (%)



Mayoritas warga, sekitar 67%, merasa puas dengan kerja Presiden Jokowi.

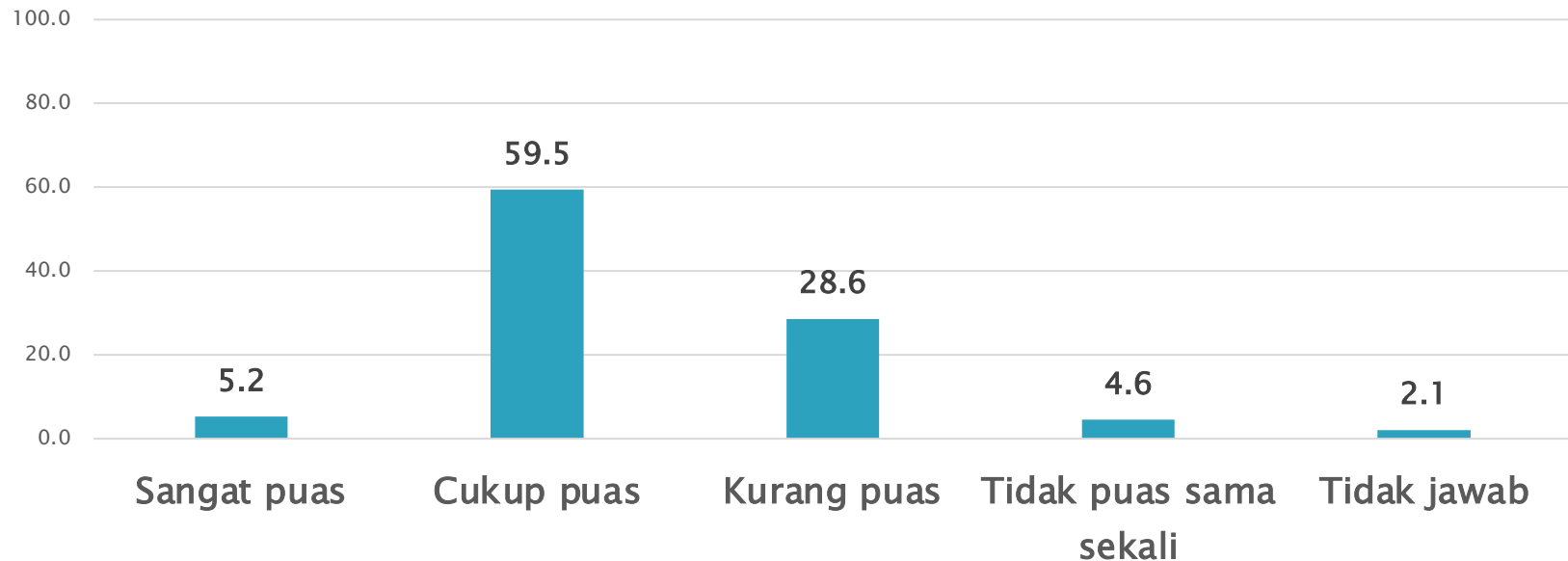
# Trend Evaluasi atas Kinerja Presiden: **Puas** dengan kinerja **Presiden (%)**

*Sumber: Surnas SMRC Juni 2015–Mar 2020, dan Survei Telepon Mei–Agustus 2020*



# Kepuasan terhadap pemerintah pusat menangani Covid-19

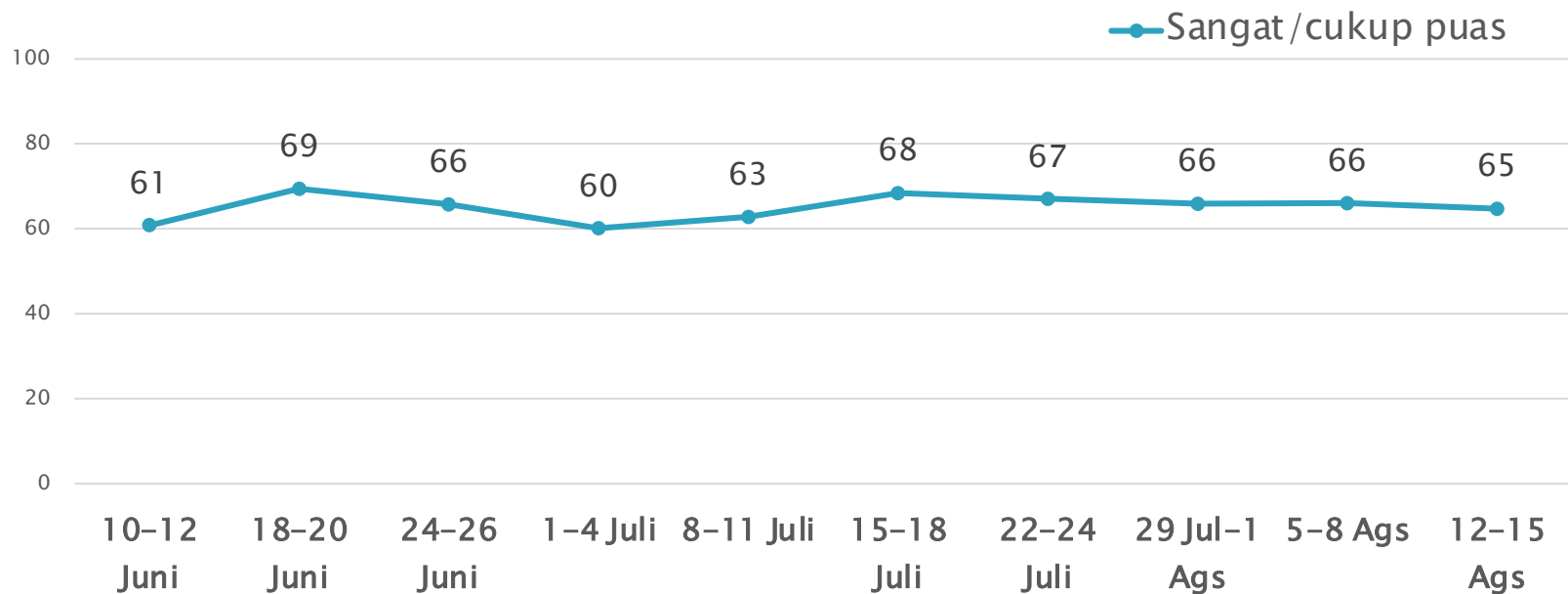
Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Pemerintah Pusat di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani masalah wabah Covid-19? ... (%)



Mayoritas warga, sekitar 65%, merasa puas dengan kerja pemerintah pusat menangani Covid-19.

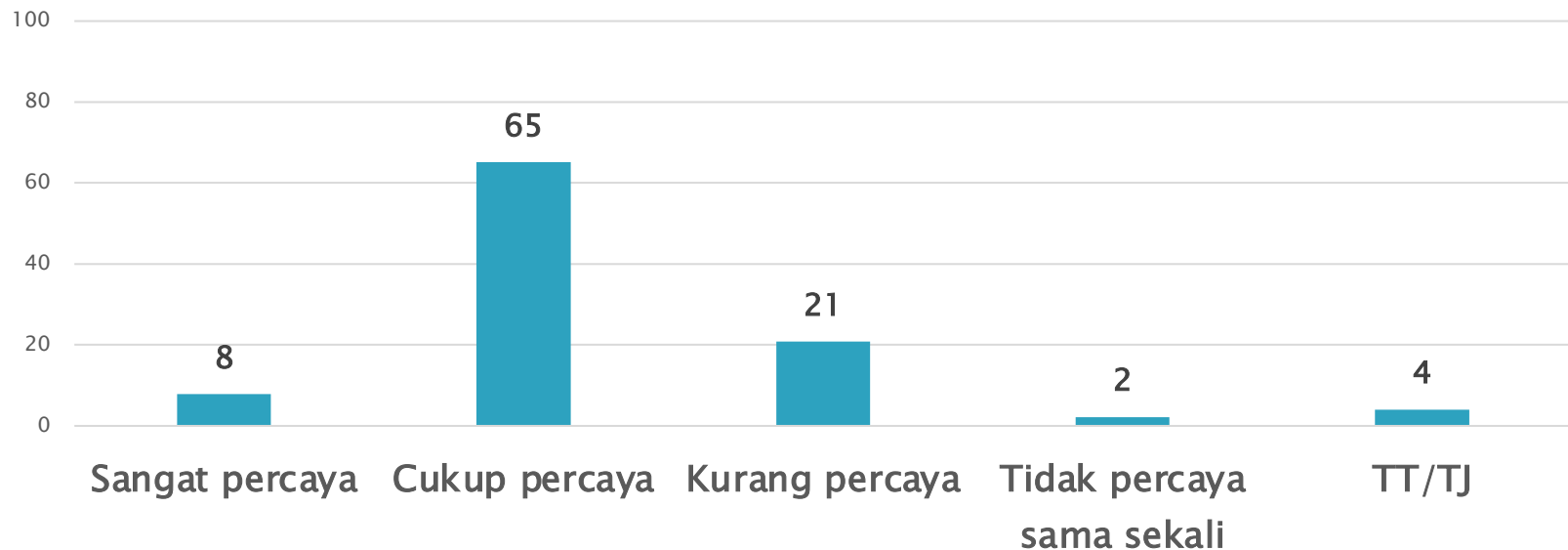
# Kepuasan terhadap kerja pemerintah pusat menangani Covid-19

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Pemerintah Pusat di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani masalah wabah Covid-19? ... (%)



# Kepercayaan kepada kemampuan Presiden membawa keluar dari krisis

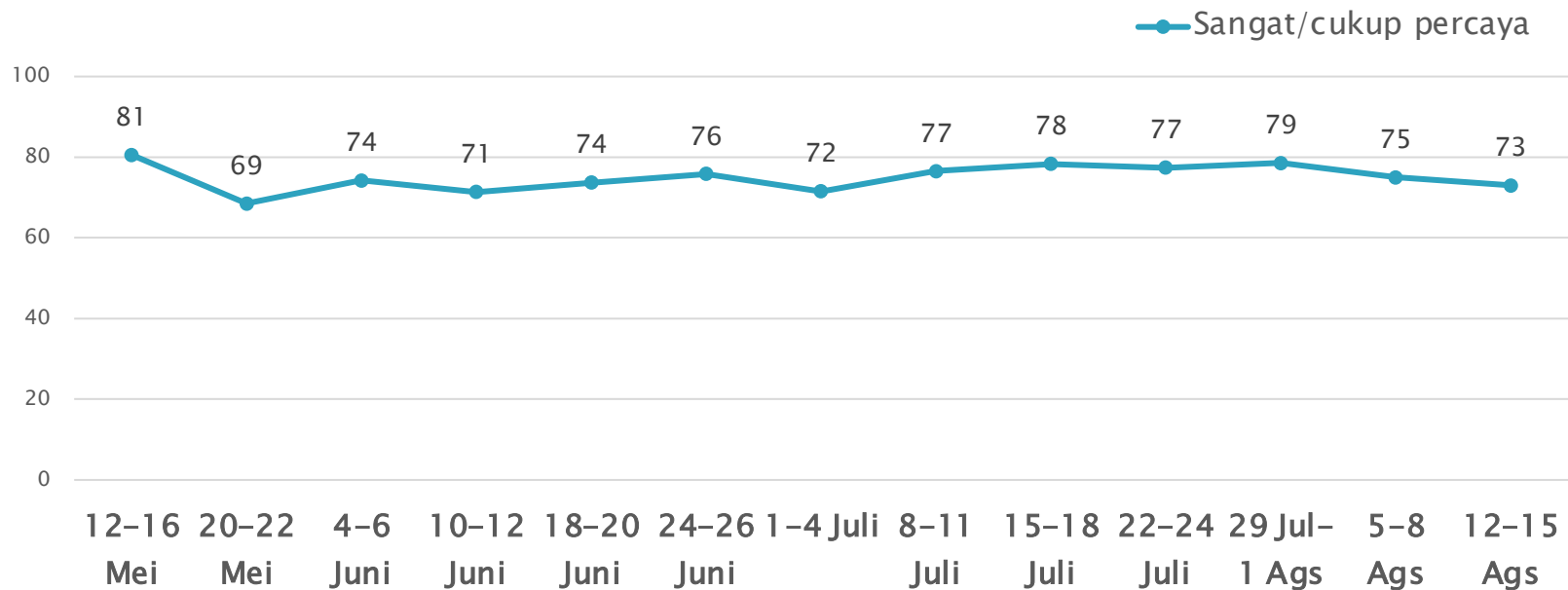
Seberapa percaya Ibu/Bapak kepada kemampuan Presiden Jokowi dalam membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19? Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya sama sekali? ... (%)



Mayoritas warga, 73%, sangat/cukup percaya Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat wabah Covid-19.

# Kepercayaan kepada Kemampuan Presiden Membawa Keluar dari Krisis

Seberapa percaya Ibu/Bapak kepada kemampuan Presiden Jokowi dalam membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19? Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya sama sekali? ... (%)



# TEMUAN

- ▶ Pada masa COVID-19 tidak ada kejadian politik yang mencolok tapi peran pemerintah mendapat perhatian lebih kuat karena COVID-19 dan pengaruhnya terhadap ekonomi. Keadaan ini dapat membuat publik lebih sensitif terhadap segala yang berkaitan dengan pemerintah atau dengan politik secara umum.
- ▶ Kondisi politik nasional secara umum pada survei terakhir dinilai rata-rata “sedang” (sekitar 3, dalam skala 1-5).
- ▶ Karena COVID-19 persepsi atas kondisi politik nasional sempat drop ketika COVID-19 sudah merebak luas (Juli 2020). Yang menyatakan kondisi politik buruk naik dari 18% ke 29% (11%), tapi secara umum masih pada kondisi “sedang.”
- ▶ Pada survei terakhir (pertengahan Agustus 2020) yang menyatakan kondisi politik buruk kembali turun menjadi 21% dari 29% pada awal Juli 2020, menjadi kurang lebih sama seperti sebelum COVID-19 merebak luas.

- ▶ Kondisi keamanan dan ketertiban secara nasional sebelum COVID-19 merebak luas (Maret 2020) dinilai “baik” oleh 66% warga. Yang menilai “buruk” pada waktu yang sama sebesar 9%.
- ▶ Setelah COVID-19 merebak luas penilaian kondisi keamanan “baik” menurun dari 66% menjadi 48% atau turun sebesar 18% di pertengahan Juli 2020.
- ▶ Setelah itu kemudian perlahan membaik. Pada survei terakhir, pertengahan Agustus 2020, penilaian kondisi keamanan “baik” cenderung naik lagi walaupun belum sampai ke titik sebelum COVID-19 merebak luas.
- ▶ Sebagian dari penurunan persepsi atas kondisi keamanan ini terkait dengan naiknya tingkat kriminalitas pada masa pandemi ini. Menurut Polri tingkat kriminalitas pada masa COVID-19 naik sebesar 7,04%. (<https://mediaindonesia.com/read/detail/314036-lima-bulan-pandemi-covid-19-kriminalitas-naik-7-persen>)

- ▶ Persepsi bahwa kondisi keamanan dan keteriban nasional secara umum “baik” sebesar 52% pada survei terakhir (12–15 Agustus 2020) konsisten dengan penilaian terhadap kemampuan pemerintah menjaga warga dari ancaman keamanan atau memberi rasa aman.
- ▶ Sebesar 52% publik tidak setuju dengan pendapat bahwa pemerintah belum bisa melindungi rakyat dari ancaman keamanan. Sementara yang berpendapat sebaliknya 42%.
- ▶ Pandangan itu juga cukup konsisten dengan pendapat 60% warga bahwa Polri secara umum baik atau sangat baik dalam menjaga keamanan atau menegakkan hukum di masyarakat.

- ▶ Persepsi atas kinerja presiden dan pemerintah pusat dan kepercayaan publik kepadanya mampu memimpin Indonesia mengatasi COVID-19 dan mengatasi krisis ekonomi karena COVID-19 masih tinggi.
- ▶ Semua penilaian publik berkaitan dengan kinerja presiden dan pemerintah, kondisi ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban, akan berpengaruh pada penilaian atas kinerja demokrasi dan pada gilirannya akan berpengaruh pada dukungan publik terhadap demokrasi itu sendiri.

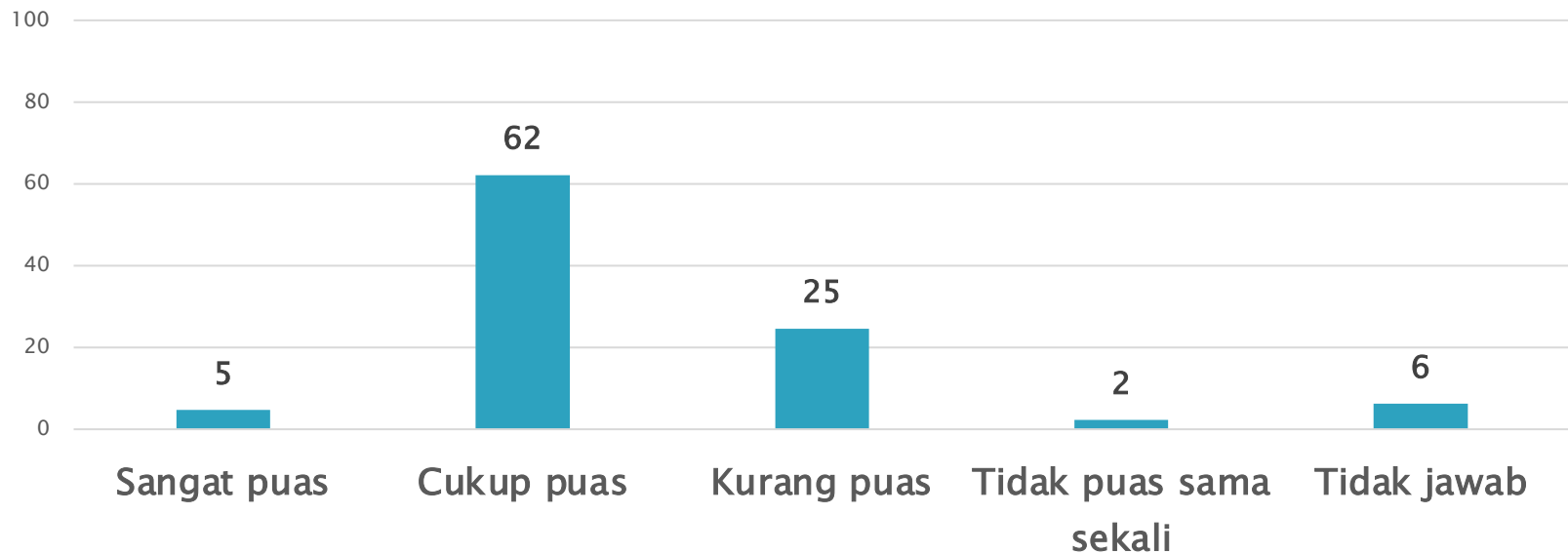
# KONDISI DEMOKRASI

# Ukuran kondisi demokrasi pada tingkat sikap massa

- ▶ Satu cara untuk mengukur kondisi demokrasi di sebuah negara adalah dengan mengamati sikap warga terhadap demokrasi dan pelaksanaannya:
- ▶ Kepuasan dengan pelaksanaan demokrasi secara umum
- ▶ Preferensi atau dukungan pada demokrasi dibanding pada bentuk rezim lain
- ▶ Penolakan pada pimpinan pemerintahan yang kuat tanpa pemilu dan tanpa kontrol DPR (otoritarianisme)
- ▶ Penolakan pada pemerintahan oleh tentara aktif (otoritarianisme militer)

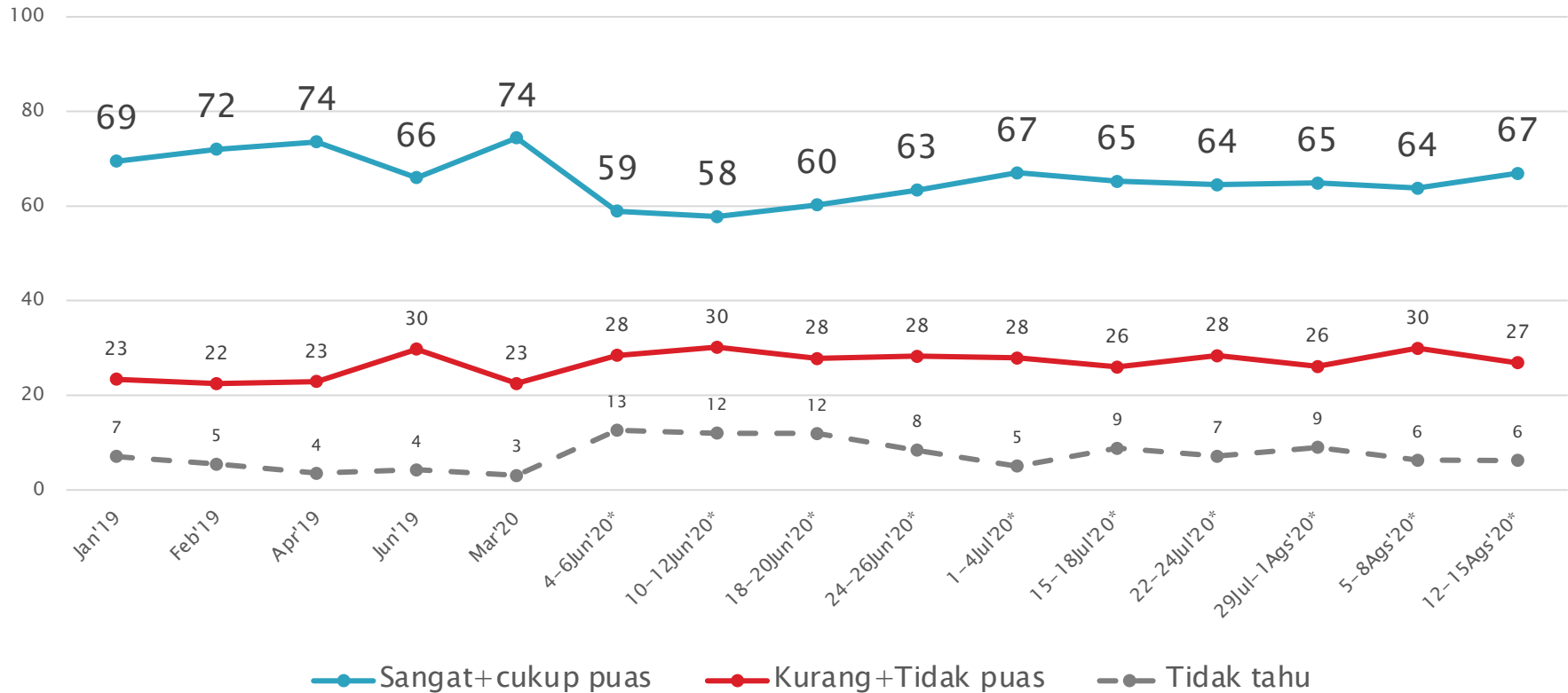
# Kepuasan Terhadap Jalannya Demokrasi

Secara umum, apakah Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan jalannya demokrasi di negeri kita sekarang ini? ... (%)



Ada 67% warga yang sangat/cukup puas dengan jalannya demokrasi, sementara yang kurang/tidak puas sama sekali sekitar 27%.

# Trend Kepuasan terhadap Demokrasi (%)



Penurunan terjadi pada Juni 2019 (-8%) setelah terjadi kerusuhan sebagai reaksi atas penetapan hasil Pilpres 2019 oleh KPU. Penurunan lebih tajam terjadi ketika COVID-19 sudah merebak secara luas (-15%, awal Juni 2020).

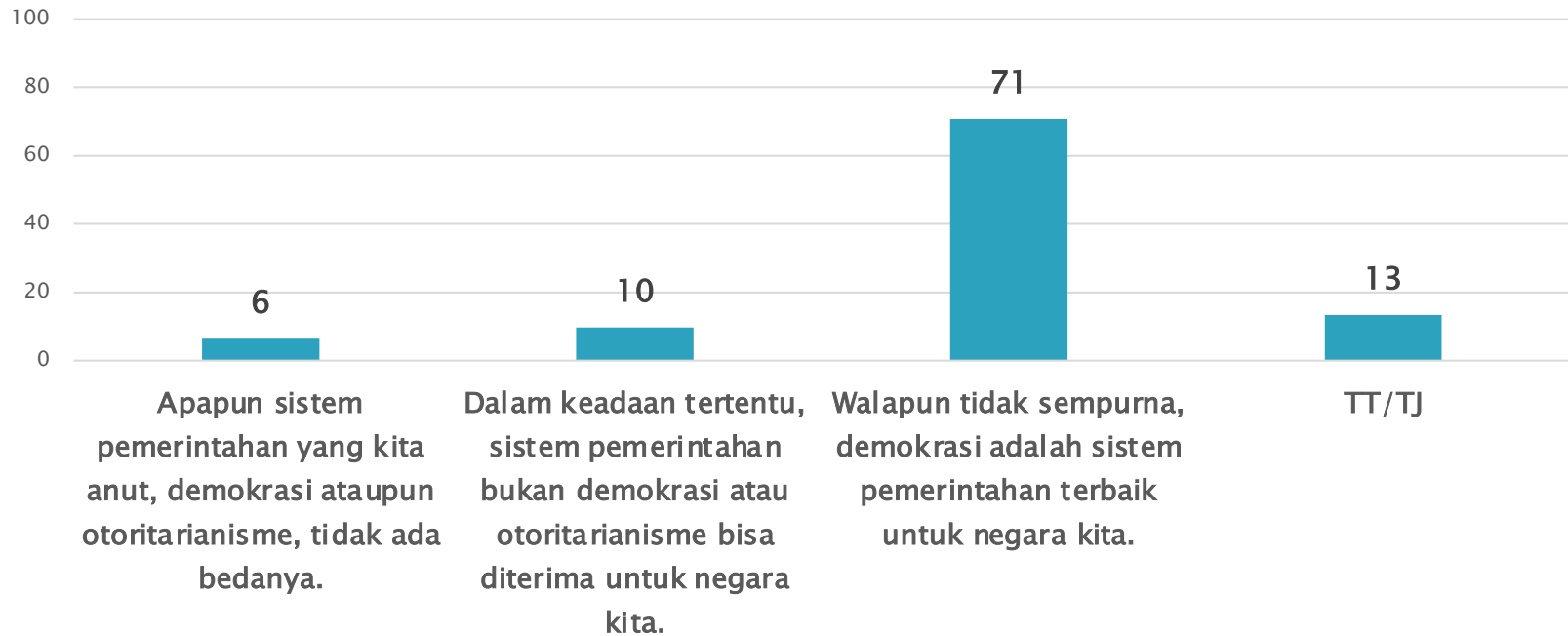
# TEMUAN

- ▶ Sebelum COVID-19 merebak luas di tanah air, kepuasan pada pelaksanaan demokrasi secara umum sebesar 74%, kemudian turun tajam pada saat COVID-19 sudah merebak luas pada awal Juni 2020 menjadi 59%. Turun sekitar 15%.
- ▶ Setelah Juni itu kembali membaik, tapi belum mencapai ke masa sebelum COVID-19 merebak luas. Pada survei terakhir (12-15 Agustus '20) tingkat kepuasan 67%.
- ▶ Walaupun publik secara umum masih puas dengan kinerja demokrasi, tapi COVID-19 menurunkan tingkat kepuasan tersebut.

- ▶ Seperti pada penilaian kondisi politik secara umum, penilaian pada kinerja demokrasi juga tak lepas dari sensitivitas publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi ini.
- ▶ Banyak muncul pendapat yang beragam apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Ini bagian dari kebebasan berpendapat, dan kepedulian publik terhadap keadaan.
- ▶ Tidak sedikit yang kritis hingga membentuk opini bahwa pemerintah kurang mendengar dan ini berpengaruh pada penilaian atas kinerja demokrasi secara umum, atau kepuasan publik dengan pelaksanaan demokrasi.
- ▶ Di dalam demokrasi baru, seperti Indonesia, kinerja demokrasi biasanya berpengaruh terhadap komitmen atau dukungan terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan.

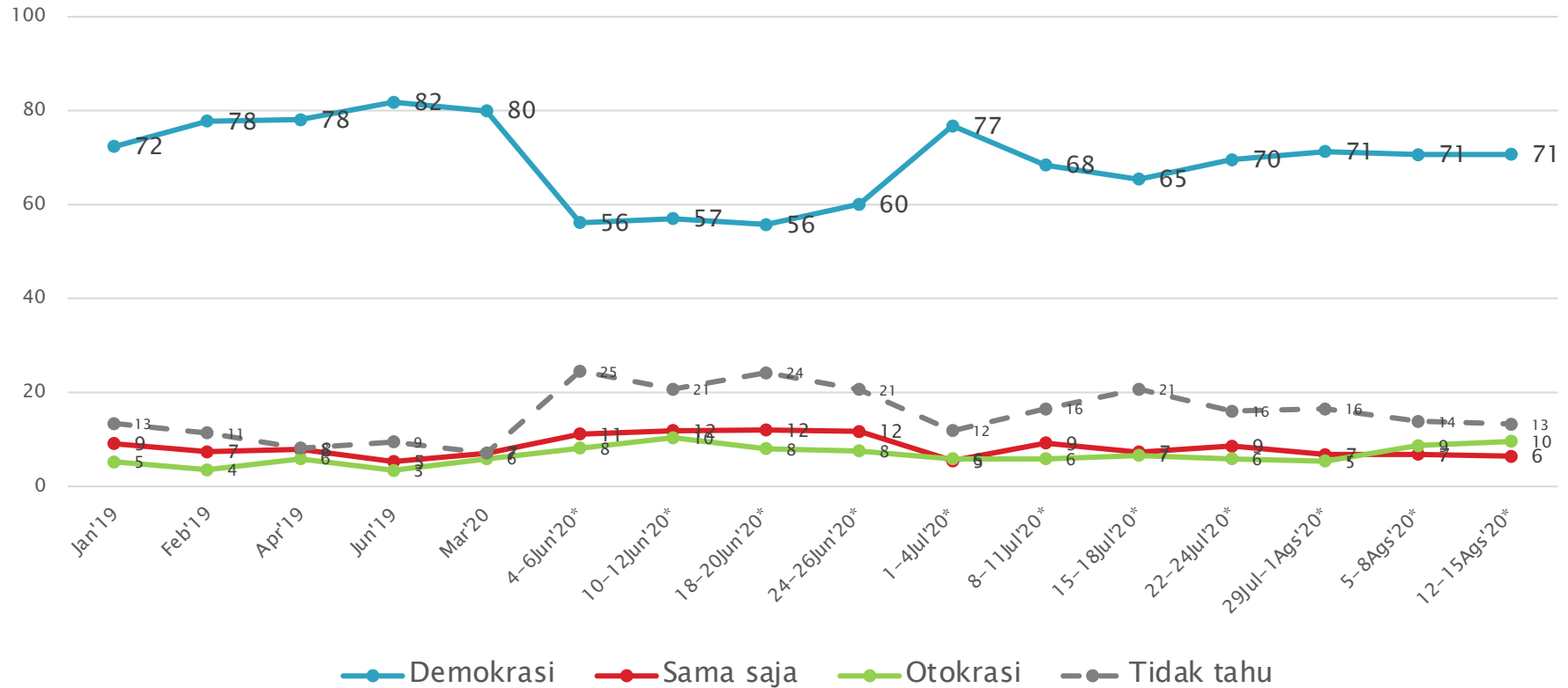
# Preferensi atau komitmen pada Demokrasi 12–15 Agustus 2020

Di antara tiga pernyataan berikut ini, manakah yang paling sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak? ... (%)



Mayoritas warga, 71%, merasa sesuai dengan pernyataan “walaupun tidak sempurna, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk negara kita”.

# Tren Preferensi pada Demokrasi (%)

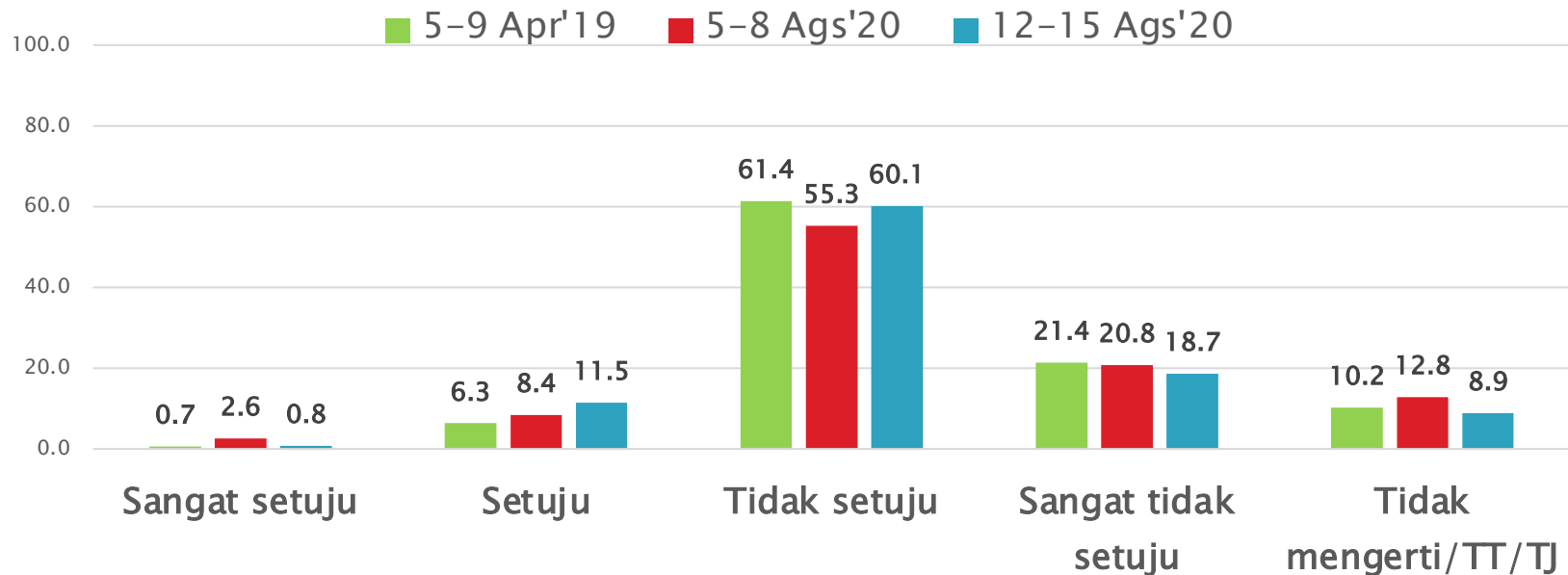


- ▶ Sebelum COVID-19 yang punya komitmen atau yang mendukung demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik sebanyak 82%.
- ▶ Komitmen itu turun tajam setelah COVID-19 merebak, dari 82% menjadi 56% pada awal Juni 2020.
- ▶ Selanjutnya terjadi pemulihan, dan pada 12-15 Agustus 71%, yang berarti belum pulih ke keadaan sebelum COVID-19.
- ▶ Keadaan tersebut cukup konsisten dengan dukungan pada otoritarianisme di bawah ini.

# Sebaiknya DPR dan Pemilu Dihapus dan Keputusan Diserahkan ke Pemimpin Kuat

Ada banyak cara untuk memerintah sebuah negara. Apakah Ibu/Bapak menyetujui atau menolak pilihan-pilihan berikut? ... (%)

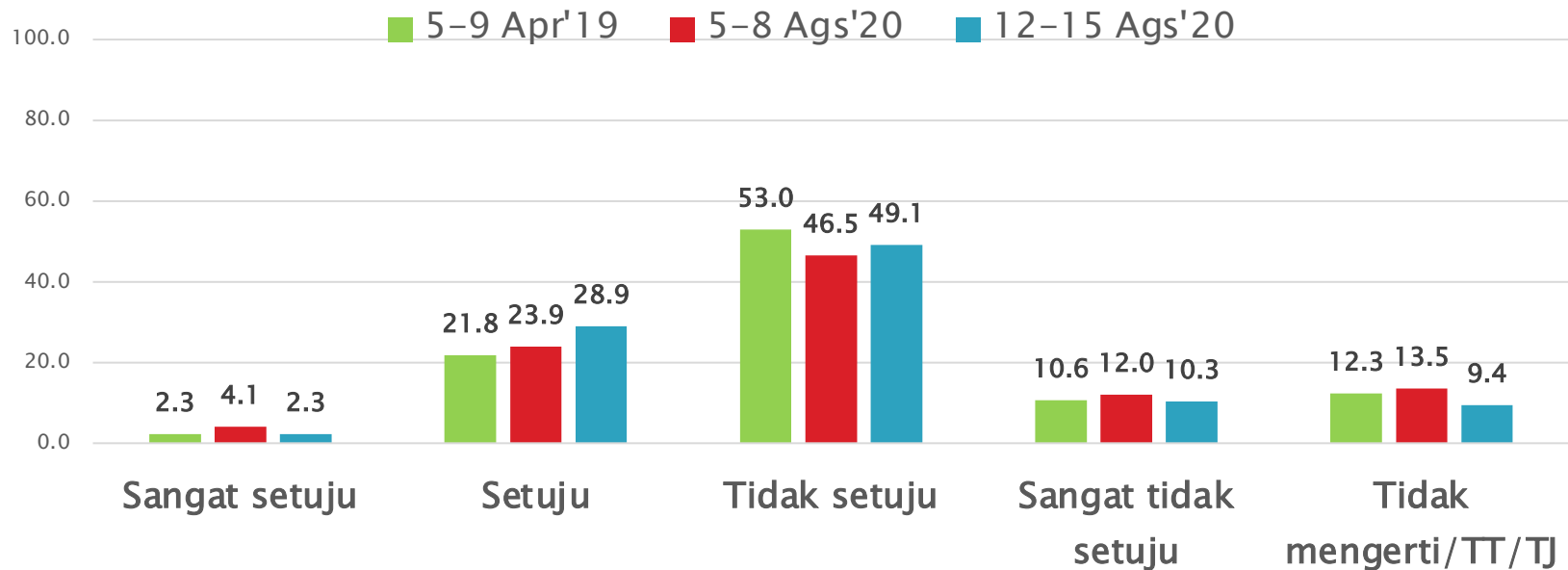
Kita sebaiknya menghapus DPR dan pemilihan umum, dan MENYERAHKAN KEPADA SEORANG pemimpin yang kuat, YANG TAK DIPILIH RAKYAT, untuk membuat keputusan



Hanya sekitar 12% yang setuju sebaiknya DPR dan pemilihan umum dihapus, dan menyerahkan kepada seorang pemimpin yang kuat, yang tak dipilih rakyat, untuk membuat keputusan. Ada kenaikan 5% dukungan pada diktator dibanding sebelum COVID-19.

# Tentara Aktif Sebaiknya Memimpin Pemerintahan Kita

Ada banyak cara untuk memerintah sebuah negara. Apakah Ibu/Bapak menyetujui atau menolak pilihan-pilihan berikut? ... (%)  
Tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita



Ada sekitar 31% yang setuju tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita. Ada kenaikan sekitar 7% dibanding sebelum COVID-19.

- ▶ Secara lebih jelas, apakah publik akan mendukung pemimpin yang tak dipilih rakyat, yang tak dikontrol DPR, yang menghapuskan pemilihan umum?
- ▶ Sebelum COVID-19 yang mendukung pemimpin demikian hanya 7%. Setelah masuk masa Covid-19 dukungan pada otoritarianisme itu naik menjadi 12%.
- ▶ Bagaimana dengan kepemimpinan tentara aktif, atau tentara aktif memimpin pemerintahan, yang merupakan bentuk otoritarianisme yang sering muncul di dunia?

- ▶ Sebelum masa COVID-19 dukungan pada pemerintahan di bawah kepemimpinan tentara aktif sebesar 24%. Setelah masuk masa COVID-19 dukungan pada rezim demikian naik menjadi 31%.
- ▶ Secara umum publik masih mendukung demokrasi, tapi COVID-19 menurunkan tingkat dukungan tersebut secara signifikan walau tidak sampai ke titik di bawah angka psikologis 50%.

# SUPREMASI SIPIL

- ▶ Komponen inti dari demokrasi adalah kepemimpinan nasional, keputusan-keputusan strategis harus dibuat oleh pejabat publik yang dipilih secara demokratis (Presiden atau perdana menteri dan DPR). Mereka yang punya legitimasi untuk memimpin dan mengambil keputusan-keputusan publik yang bersifat strategis.
- ▶ Pemimpin ini dari sipil. Karena itu dikenal konsep supermasi sipil.

- ▶ Terkait dengan itu, dalam demokrasi, tentara adalah kekuatan profesional, yang tugas utamanya adalah kekuatan bersenjata untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional terutama dari ancaman kekuatan bersenjata yang lain.
- ▶ Sementara itu keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di dalam negeri menjadi tugas inti Polri.
- ▶ Bagaimana publik mendukung konsep supermasi sipil demikian, profesionalisme TNI, dan tugas utama Polri?

# Reformasi'98 Jadikan Indonesia di Bawah Kepemimpinan Sipil bukan Tentara Aktif

Reformasi 1998 di antaranya adalah menjadikan Indonesia berada di bawah kepemimpinan sipil yang dipilih oleh rakyat, bukan tentara aktif. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan isi reformasi tersebut? ... (%)



Ada 71% warga yang setuju bahwa Reformasi 1998 di antaranya adalah menjadikan Indonesia berada di bawah kepemimpinan sipil yang dipilih oleh rakyat, bukan tentara aktif

# Indonesia di Bawah Kepemimpinan Sipil, TNI di Bawah Presiden

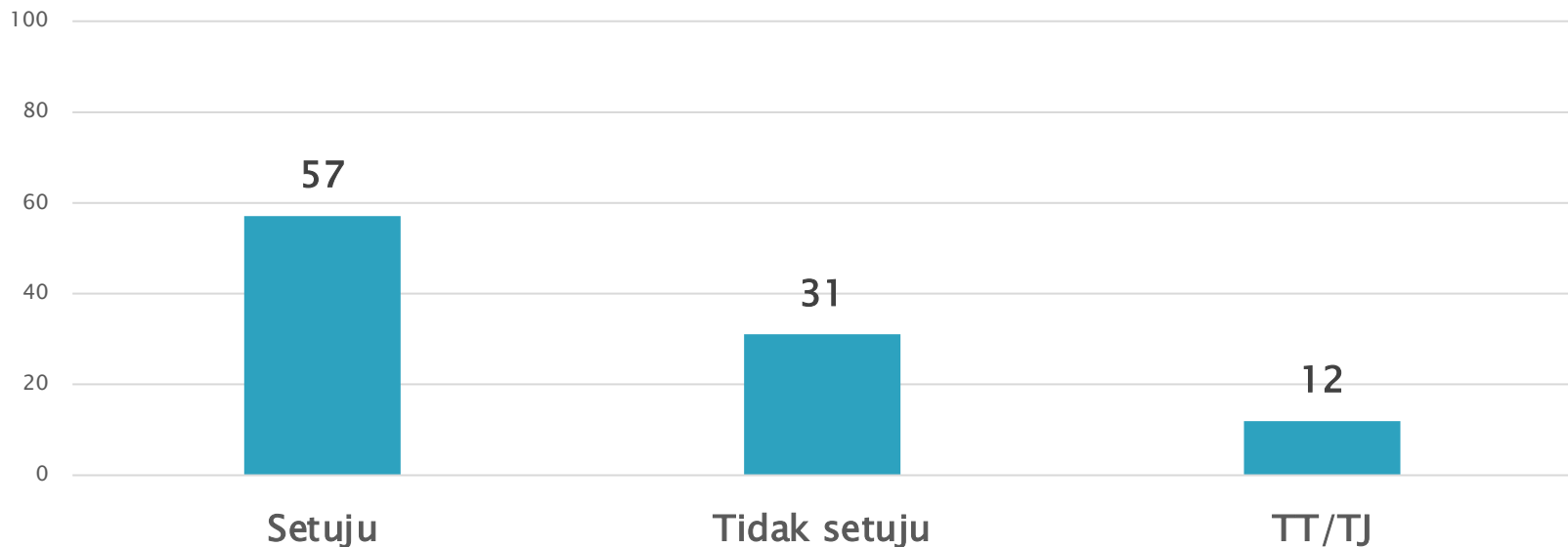
Indonesia berada di bawah kepemimpinan sipil itu bermakna bahwa semua Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di bawah kuasa Presiden yang dipilih rakyat sebagai panglima tertinggi dan TNI harus tunduk padanya. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan aturan tersebut? ... (%)



Mayoritas warga, 76%, setuju bahwa Indonesia berada di bawah kepemimpinan sipil itu bermakna semua Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di bawah kuasa Presiden yang dipilih rakyat sebagai panglima tertinggi dan TNI harus tunduk padanya.

# Tentara Tidak Boleh Terlibat Langsung dengan Penegakan Keamanan dan Ketertiban dalam masyarakat

Satu amanat reformasi adalah bahwa dalam keadaan normal atau tidak perang atau dalam keadaan tidak ada kerusuhan besar yang tak bisa ditangani polisi, tentara tidak boleh terlibat langsung dengan penegakan keamanan atau ketertiban apapun dalam masyarakat. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan amanat tersebut? ... (%)



Ada 57% warga yang setuju dengan amanat reformasi bahwa dalam keadaan normal atau tidak perang atau dalam keadaan tidak ada kerusuhan besar yang tak bisa ditangani polisi, tentara tidak boleh terlibat langsung dengan penegakan keamanan atau ketertiban apapun dalam masyarakat.

# TNI Sepenuhnya Diabdikan Menjaga Pertahanan dari Ancaman Luar/Darurat Keamanan Nasional

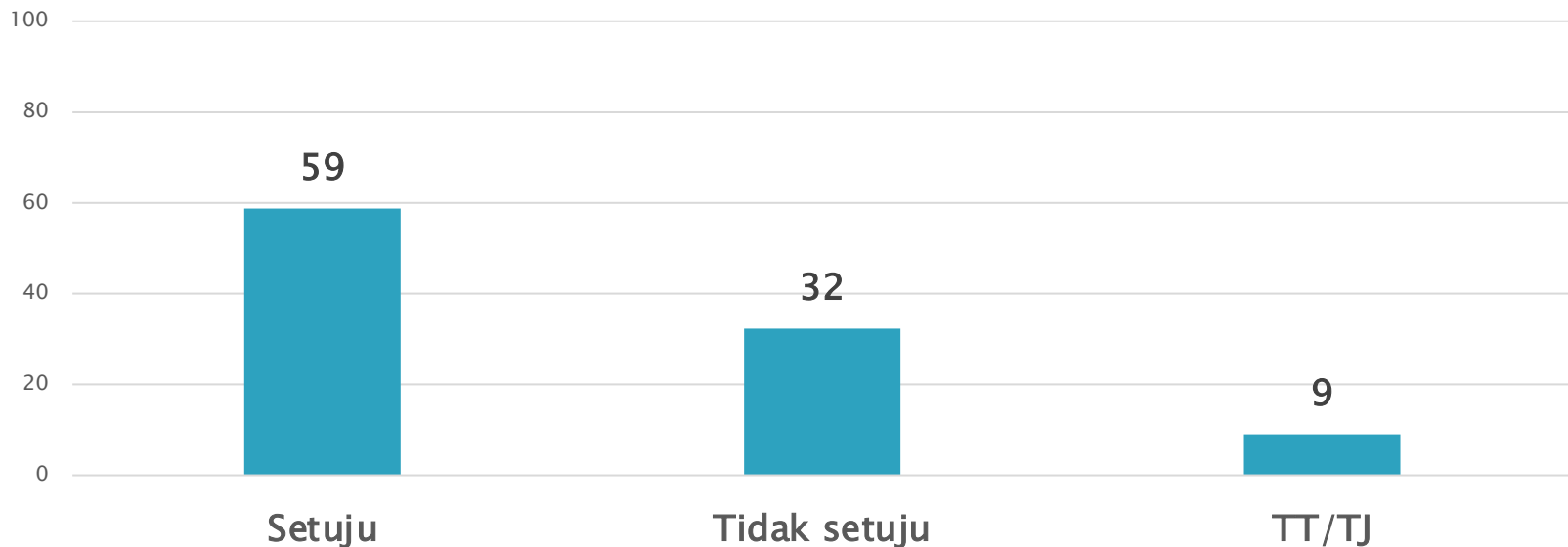
Salah satu amanat reformasi adalah Tentara aktif atau tentara nasional Indonesia (TNI) sepenuhnya diabdikan untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional Indonesia dari ancaman dari luar negeri atau dari kerusuhan dalam negeri berskala besar yang dinyatakan dalam keadaan darurat keamanan nasional oleh Presiden. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan amanat tersebut? ... (%)



Ada 74% warga yang setuju dengan amanat reformasi bahwa Tentara aktif atau tentara nasional Indonesia (TNI) sepenuhnya diabdikan untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional Indonesia dari ancaman dari luar negeri atau dari kerusuhan dalam negeri berskala besar yang dinyatakan dalam keadaan darurat keamanan nasional oleh Presiden.

# Semua Urusan Keamanan, Ketertiban dan Penegakan Hukum Dalam Negeri Tanggung Jawab Polisi

Salah satu amanat reformasi adalah semua urusan keamanan, ketertiban, atau penegakan hukum dalam negeri adalah tanggung jawab Polisi Republik Indonesia, bukan tugas Tentara (TNI). Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan amanat tersebut? ... (%)



Ada 59% warga yang setuju dengan amanat reformasi bahwa semua urusan keamanan, ketertiban, atau penegakan hukum dalam negeri adalah tanggung jawab Polisi Republik Indonesia, bukan tugas Tentara (TNI).

# TEMUAN

- ▶ Publik mendukung supremasi sipil (71%)
- ▶ Publik mendukung bahwa TNI harus di bawah komando dan kontrol kepala negara (Presiden) yang dipilih rakyat (76%)
- ▶ Publik setuju TNI tidak boleh terlibat dalam masalah keamanan dan ketertiban apapun dalam masyarakat (57%)

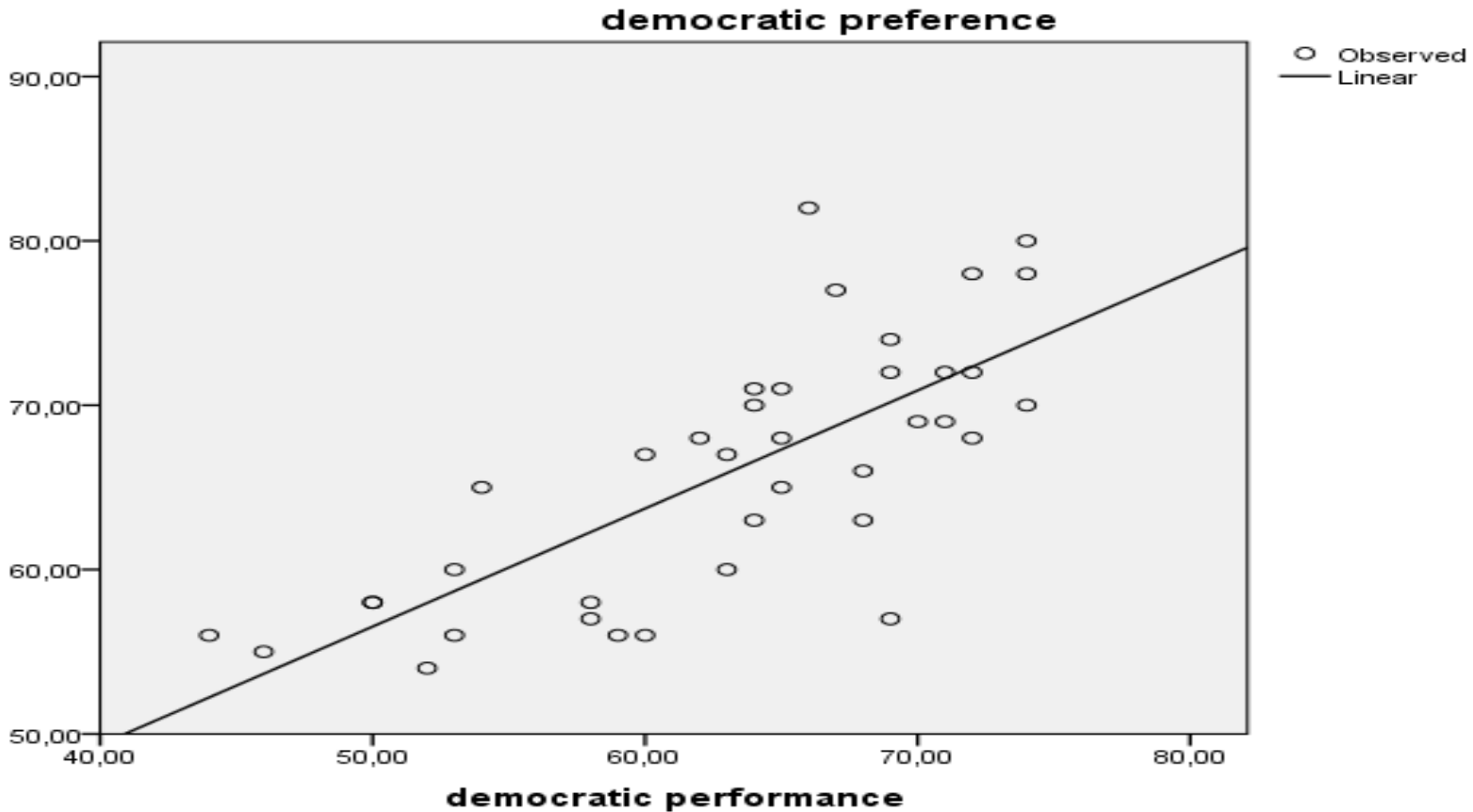
- ▶ Sebanyak 74% dari publik setuju bahwa TNI secara khusus bertugas untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman luar negeri dan dari dalam negeri dalam keadaan darurat keamanan yang dinyatakan oleh pemimpin negara.
- ▶ Sebanyak 59% publik setuju bahwa semua urusan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tugas Polri.

# SUMBER-SUMBER PENGUATAN DEMOKRASI

- ▶ Dukungan atau komitmen pada demokrasi sebagai indikasi kuatnya demokrasi di sebuah negara di demokrasi baru seperti Indonesia banyak dipengaruhi oleh bagaimana demokrasi bisa dijalankan atau oleh kinerja demokrasi.
- ▶ Kinerja demokrasi pada tingkat individu warga negara biasa diukur dari kepuasan pada pelaksanaan demokrasi itu sendiri.
- ▶ Korelasi berikut menunjukkan bukti tersebut.

# Korelasi kepuasan dengan dan preferensi/komitmen pada demokrasi

(r'Pearson: 0,749, p-value: 0,001; N = 38)



# TEMUAN

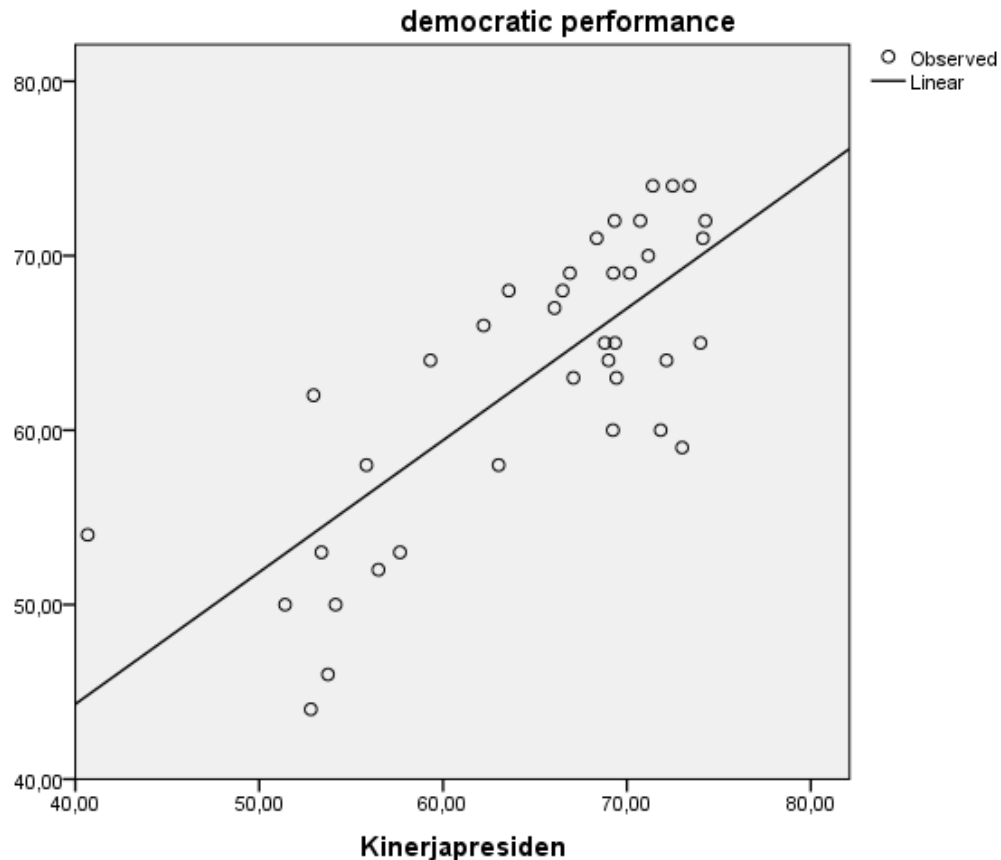
- ▶ Semakin puas warga dengan pelaksanaan demokrasi maka warga tersebut semakin kuat dalam mendukung demokrasi, dan demikian juga sebaliknya.
- ▶ Keyakinan pada demokrasi sebagai sistem terbaik dapat luntur bila dalam prakteknya demokrasi tidak bisa dijalankan dengan baik.
- ▶ Sementara itu kinerja demokrasi atau kepuasan dengan kinerja demokrasi banyak dipengaruhi oleh kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat.

# Kinerja Pemerintah

- ▶ 1) Kepuasan atas kinerja presiden
- ▶ 2) Kepuasan atas kemampuan pemerintah menanggulangi COVID-19
- ▶ 3) Keyakinan atas kemampuan pemerintah menanggulangi krisis ekonomi akibat COVID-19.
- ▶ 4) Kondisi politik
- ▶ 5) Kondisi keamanan dan ketertiban
- ▶ 6. Kondisi ekonomi

# Korelasi kepuasan atas pelaksanaan demokrasi dan kepuasan atas kinerja presiden

( $r$  Pearson: 0,767,  $p < .001$ . N = 38)



# Korelasi kepuasan dg kinerja demokrasi dengan beberapa faktor

(r'Pearson, data survei 12–15 Agustus 2020)

	Kepuasan terhadap kinerja demokrasi
Kepuasan terhadap kinerja presiden	.365**
Kepuasan dengan kerja Pemerintah Pusat menangani Covid-19	.352**
Kemampuan Presiden membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat Covid-19	.337**
Kondisi politik sekarang	.307**
Kondisi keamanan sekarang	.244**
Kondisi ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu	.160**
Kondisi ekonomi nasional setahun ke depan	.158**

# TEMUAN

- ▶ Dukungan atau komitmen pada demokrasi dipengaruhi oleh bagaimana demokrasi dipraktikkan.
- ▶ Penilaian bagaimana demokrasi dipraktikkan, apakah baik atau tidak, memuaskan atau tidak memuaskan berhubungan dengan kinerja presiden, kinerja mengatasi COVID-19, mengatasi krisis ekonomi akibat COVID-19 tersebut, keadaan politik, keadaan keamanan, dan keadaan kondisi ekonomi nasional.

- ▶ Bila kinerja presiden dan pemerintah tersebut, kondisi politik, keamanan, dan ekonomi memburuk maka kinerja demokrasi akan memburuk yang berdampak kemudian pada merosotnya dukungan atau komitmen pada demokrasi.

# KESIMPULAN

- ▶ Cukup banyak negara di dunia yang demokrasinya memburuk karena COVID-19 ini. Norma-norma demokrasi diabaikan karena darurat COVID-19.
- ▶ Bagaimana dengan di Indonesia?
- ▶ Satu cara untuk menilai kondisi demokrasi di sebuah negara adalah dengan meminta warganya sendiri mengungkapkan bagaimana mereka menilai kinerja demokrasi dan komitmen mereka terhadap demokrasi, penolakannya terhadap otokrasi atau otoritarianisme, termasuk ketika mengalami COVID-19 ini.

- ▶ Publik umumnya puas dengan kinerja demokrasi, mendukung demokrasi, menolak diktator atau otoritarianisme, setelah 6 bulan mengalami pandemi COVID-19.
- ▶ Tapi perasaan puas dan komitmen tersebut di masa COVID-19 mengalami penurunan berarti.

# DEMOKRASI SEBELUM DAN SETELAH MASUK COVID-19 (%)

Keadaan	Sebelum COVID-19	Setelah 6 bulan COVID-19	Perubahan
Kepuasan dengan pelaksanaan demokrasi	74	67	-7
Komitmen pada demokrasi	82	71	-11
Dukungan pada diktator	7	12	+5
Dukungan pada diktator militer	24	31	+7

- ▶ Di masa COVID-19, mayoritas publik mendukung supermasi sipil atas tentara.
- ▶ TNI harus berada di bawah kepemimpinan sipil yang dipilih secara demokratis
- ▶ Publik mendukung tugas TNI untuk pertahanan negara secara bersenjata menghadapi ancaman bersenjata dari luar negeri dan untuk menjaga keamanan nasional dalam kondisi darurat keamanan nasional.

- ▶ Publik umumnya tidak setuju TNI terlibat dalam keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam masyarakat.
- ▶ Publik mendukung masalah keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam masyarakat adalah tugas Polri.

# SUPERMASI SIPIL, TUGAS UTAMA TNI DAN POLRI (%)

	Setuju	Tidak Setuju	Tidak tahu
Indonesia di bawah pemimpin sipil, dipilih secara demokratis	71	15	14
TNI di bawah kendali pemimpin sipil (presiden)	76	14	10
TNI tak boleh bertugas untuk keamanan dan ketertiban masyarakat	57	31	12
TNI bertugas untuk pertahanan dari ancaman bersenjata dari luar dan dalam keadaan darurat keamanan nasional	74	16	10
Keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam negeri semuanya tugas Polri	59	32	9

- ▶ Penurunan pada kepuasan atas kinerja demokrasi terkait dengan penurunan di bidang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat pada masa pandemi.
- ▶ Juga dipengaruhi oleh penurunan yang sangat tajam di bidang ekonomi nasional.
- ▶ Namun demikian, penurunan ekonomi yang tajam tersebut, yang potensial dapat menghancurkan demokrasi, sejauh ini dapat dinetralisasi efeknya pada kinerja demokrasi dan komitmen pada demokrasi karena penilaian pada kinerja presiden masih tinggi, masih optimis dengan kinerja pemerintah mengatasi COVID-19 dan mengatasi krisis ekonomi karena COVID-19 tersebut.

- ▶ Ekonomi yang sangat buruk akibat COVID-19, baik menurut perhitungan teknokrat (BPS) maupun publik secara umum, dapat melumpuhkan demokrasi.
- ▶ Sejauh ini kelumpuhan itu tidak terjadi dilihat dari penilaian teknokratik (V-Dem) maupun publik secara umum karena modal politik Indonesia masih kuat: Kepercayaan publik pada pemerintah masih besar.
- ▶ Modal politik ini bila tidak digunakan dengan baik hingga COVID-19 dan krisis ekonomi yang disebabkan tidak tertangani dengan baik maka kelumpuhan demokrasi Indonesia bisa terjadi.

Terima Kasih